

SKRIPSI

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010)

ANDI FARADILLAH



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI FARADILLAH
A31108965**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010)

disusun dan diajukan Oleh :

**ANDI FARADILLAH
A31108965**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Ratna A. Damayanti, S.E., M.Soc, SC, Ak
NIP.196703191992032003

Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak
NIP.196511271991032001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

DR. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANDI FARADILLAH

NIM : A31108965

Jurusan/program studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, April 2013

Yang membuat pernyataan,

ANDI FARADILLAH

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu DR. Ratna A. Damayanti, S.E., M.Soc, Sc, Ak dan Ibu Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada semua kepala dan pegawai subbagian keuangan SKPKD dan SKPD Kota Makassar yang telah bersedia peneliti wawancarai. Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih yang amat besar juga peneliti berikan kepada H. Andi Risaluddin dan Hj. Andi Polandia sebagai orang tua peneliti erta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Terima kasih pula untuk obstackle terkhusus untuk ratih, mardu, tere, novi, dan yuyun. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, April 2013

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010)

ANALYSIS OF GOVERNMENT READINESS IN APPLYING ACCOUNTING STANDARDS ADMINISTRATION (GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 YEAR 2010)

Andi Faradillah
Ratna A. Damayanti
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD Kota Makassar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, kesiapan pemerintah daerah.

This research aimed to determine the readiness of the government of Makassar in implementing accrual-based government accounting standards. Data were collected by observation and in-depth interviews with managers and staff of the finance department of SKPD and SKPKD Makassar. The results were analyzed by the method of data collection using qualitative interpretive approach. The results showed that the readiness of the government of Makassar in the implementation of the accrual basis of government accounting standards is a reflection of a formality. This is supported by the government regulations to require all local governments including the government of Makassar in implementing accrual-based. The complexity of the financial statements to be a major factor in resistant attitudes of the government's financial manager of Makassar in the implementation of accrual-based. Meanwhile, in terms of organizational culture, government of Makassar required to implement accrual-based government accounting standards.

Keywords: government accounting standards, accrual basis, the readiness of the local government.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan	9
2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	9
2.1.2 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan	10
2.1.3 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan	12
2.2 Akuntansi Berbasis Akrua	13
2.2.1 Pengertian Basis Akrua	13
2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua	13
2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	15
2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	15
2.3.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	16
2.3.3 Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Negara Lain	20
2.4 Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	23
2.5 Kendala Akuntansi Berbasis Akrua	27
2.6 Teori Budaya Organisasi	34
2.7 Implikasi pada Individu dalam Menerima Perubahan	38
2.8 Penelitian Terdahulu	43
2.9 Kerangka Pikir	45
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 46
3.1 Rancangan Penelitian	46
3.2 Kehadiran Peneliti	47
3.3 Lokasi penelitian	47
3.4 Sumber Data	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisis Data	50
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	52

3.8 Tahap-tahap Penelitian	53
BAB IV KESIAPAN PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	55
4.1 Makna Basis Akrua dalam Pemerintah Kota Makassar: Kompleksitas Laporan Keuangan	55
4.2 Kesiapan SAP Akrua: Refleksi Formalitas	62
BAB V TEORI BUDAYA ORGANISASI DAN SIKAP INDIVIDU DALAM MENERIMA PERUBAHAN	69
5.1 Bureaucratic Culture: Ranah Budaya organisasi Pemerintah Daerah	69
5.2 Sikap Positif dan Negatif: Reaksi Individu Terhadap Perubahan Budaya	75
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83
6.3 Keterbatasan Penelitian	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.	Strategi Penerapan SAP Akrua.....	19
3.1.	Objek Penelitian pada Pemerintah Kota Makassar	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Manuskrip	89
2. Biodata	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang

bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas

menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya

informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah Kota Makassar memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Makassar wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kota Makassar harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kota Makassar agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik menganalisis persiapan pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan basis akrual. Selain itu, penulis juga akan menguraikan pengaruh budaya organisasi dan sikap individu dengan adanya perubahan standar akuntansi pemerintahan kas menuju akrual menjadi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)”.

1.2. Rumusan Masalah

Kehadiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015 nanti. Penerapan basis akrual yang sesuai di amanahkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini memerlukan berbagai persiapan untuk menuju ke arah tersebut. Pentahapan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual oleh pemerintah daerah dapat

dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diberikan oleh KSAP per tiap tahun dari program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat.

2) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang

yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan melalui lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang mengurai teori-teori yang relevan, yang melandasi dan mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, mencakup rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan tingkat keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV KESIAPAN PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Pada bab ini berisi penjelasan dan pemaparan terhadap makna basis akrual bagi pemerintah Kota Makassar serta kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam penerapan SAP akrual.

**BAB V TEORI BUDAYA ORGANISASI DAN SIKAP INDIVIDU
DALAM MENERIMA PERUBAHAN**

Pada bab ini berisi penjelasan dan pemaparan terhadap tipe budaya organisasi yang dianut dan sikap individu terhadap perubahan budaya.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi peneliti pada saat melakukan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan *audit*.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (www.wikiapbn.com).

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2.1.2. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu, badan akuntansi keuangan negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu,

pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Nordiawan (2006), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh ikatan akuntan indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

Mahsun dkk (2007:11) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan *audit* di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi

pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dkk,2007).

2.1.3. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

3.2. Akuntansi Berbasis Akrua

2.2.1. Pengertian Basis Akrua

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

2.2.2. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Menurut KSAP (2006:1), dalam wacana akuntansi,

secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002:155), pengaplikasian *accrual* basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual* basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*proper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*).

Menurut Bastian (2006:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam

laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Kemudian menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

3.3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

2.3.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual terdapat pada lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Sementara

lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa:

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa:

Apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut kedua pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam standar akuntansi pemerintahan jika menggunakan basis akrual, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran).

2.3.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. ADB (Asian Development Bank) secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul *Accrual Budgeting and Accounting in*

Government and its Relevance for Developing Member Countries dan memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrual bagi negara berkembang, yaitu:

- 1) Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat dua model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model *big bang* dan model bertahap. Keuntungan pendekatan *big bang* adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan.
- 2) Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.
- 3) Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah.

- 5) Sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual.
- 6) Badan *audit* tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan *audit* memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga *audit*.
- 7) Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Mulyana (2009:13), penerapan basis akrual dapat dilakukan secara *top-down* atau *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (*time frame*) yang pasti dan seragam. Sedangkan bila diterapkan secara *bottom-up*, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan secara *bottom-up* dapat dilakukan dalam *time frame* pendek, maupun *time frame medium*. Penerapan akuntansi akrual dalam *time frame* pendek (katakanlah 1-3 tahun) akan beresiko timbulnya *reform fatigue* yaitu hilangnya *sense of urgent* dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan perubahan-

perubahan yang terus-menerus tanpa merasakan manfaatnya secara langsung. Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam *time frame medium* (katakanlah, 4-6 tahun). Penerapan secara *time frame medium* dapat dilakukan dengan cara terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di pemerintah pusat yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai *pilot project*; kemudian apabila *pilot project* sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah lainnya.

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Strategi Penerapan SAP Akrual

Tahun	Agenda
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual • Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual • Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Piloting beberapa KL dan BUN • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP (2011)

2.3.3. Penggunaan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual di Negara Lain.

Pemerintah Swedia merupakan salah satu dari beberapa negara yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut merupakan salah satu wujud reformasi manajemen yang telah dimulai pada akhir 1980-an dan mulai diimplementasikan pada awal tahun 1990-an. Pengembangan dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memakan waktu beberapa tahun dan tergolong lancar karena tidak ada perdebatan besar di pemerintahan dan tidak ada penolakan dari kementerian. Standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pemerintah Swedia mempunyai beberapa karakteristik: pertama, standar akuntansi berbasis akrual mencakup pemerintah (secara keseluruhan) dan kementerian/lembaga. Kedua, standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dapat dikelompokkan sebagai *relatively full accrual accounting*. Pengecualian hanya terhadap perlakuan aset bersejarah (*heritage asset*) dan pajak. Ketiga, penggunaan nilai historis. Keempat, setiap kementerian/lembaga menyiapkan laporan operasional, neraca, laporan dana, dan catatan atas laporan keuangan (Simanjuntak, 2010).

Menurut Asian Development Bank dalam makalah berjudul "*Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries*", negara lain yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada era 1990-an adalah Selandia Baru. Selandia Baru menggunakan pendekatan model *big bang* dalam penerapan basis akrual untuk seluruh unit pemerintahan dan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada

waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru dikarenakan tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibilitas kepada SDM.

Komponen laporan keuangan pemerintah Selandia Baru terdiri atas: pertama, laporan pertanggungjawaban (*statement of responsibility*) yang berisi pernyataan tanggung jawab menteri keuangan atas keterpaduan, informasi yang disajikan dan ketaatan laporan keuangan kepada undang-undang. Kedua, laporan kinerja keuangan (*statement of financial performance*) yang menunjukkan sumber-sumber pendapatan utama, belanja, surplus/defisit, deviden, dan pembagian surplus selain deviden. Ketiga, laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) yang menunjukkan saldo aset, liabilitas, dan ekuitas. Keempat, laporan arus kas (*cash flows statement*) yang menunjukkan arus kas dari operasi seperti pajak ditambah/dikurangi dengan pengeluaran kas dari investasi dan aktivitas lainnya. Kelima, laporan pinjaman (*statement of borrowing*) yang menyajikan jumlah seluruh pinjaman pemerintah dengan surat-surat berharga dan deposito yang dimiliki sehingga jumlah pinjaman bersih dapat tergambarkan. Laporan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu laporan analisis pinjaman, laporan mutasi pinjaman dan laporan profil jatuh tempo pinjaman. Keenam, laporan perikatan (*statement of commitments*), laporan ini menyajikan perikatan-perikatan modal dan operasional menurut jenis dan prasyaratnya masing-masing. Ketujuh, laporan kewajiban kontijensi (*statement of contingent liabilities*) yang menyajikan kewajiban kontijensi yang dapat dikuantifikasikan seperti kewajiban jaminan, asuransi kerugian dan kewajiban yang berkaitan dengan perselisihan hukum. Kedelapan, laporan pengeluaran dan belanja yang belum

diaprosiasikan (*statement of unappropriated expenditures and expenses*) yang menyajikan pengeluaran atau belanja yang melampaui apropriasi atau tanpa apropriasi dari parlemen. Hal ini sesuai dengan peraturan yang memungkinkan menteri keuangan melakukan pengeluaran-pengeluaran tertentu tanpa apropriasi. Kesembilan, laporan pengeluaran atau belanja darurat (*statement of emergency expenditures or expenses*). Kesepuluh, laporan dana perwalian (*statement of trust money*) yang menyajikan posisi keuangan awal dan akhir, kontribusi, distribusi, pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh badan-badan perwalian milik pemerintah. Kesebelas, laporan atas kebijaksanaan akuntansi (*statement of accounting policies*) yang menyajikan kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Keduabelas, catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statements*). Ketigabelas, laporan badan pemeriksa (*report of the audit office*).

Menurut OECD-PUMA/SBO,2002 dalam Mulyana (2009) Dalam perkembangan satu dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) meskipun masih terdapat perbedaan derajat akrualnya di antara negara-negara tersebut. Di negara-negara anggota OECD, basis akrual sejauh ini lebih banyak diterima untuk pelaporan keuangan daripada untuk tujuan penganggaran. Dua alasan yang sering dikemukakan atas hal ini adalah pertama, penganggaran secara akrual dipercaya akan menimbulkan resiko disiplin anggaran. Keputusan politik untuk mengeluarkan uang harus dikaitkan dengan kapan pengeluaran itu dilaporkan dalam anggaran. Hanya basis kas yang dapat memenuhi hal tersebut. Alasan kedua, yaitu bahwa legislator cenderung resisten untuk mengadopsi anggaran akrual karena kompleksitas dari

konsep akrual itu sendiri. Namun demikian, apabila penerapan akrual hanya digunakan untuk pelaporan keuangan dan tidak untuk anggaran, kelemahannya adalah tidak akan menyelesaikan masalah secara serius/komprehensif. Anggaran adalah dokumen kunci dari manajemen sektor publik (pemerintah) dan akuntabilitas didasarkan pada anggaran yang telah disetujui legislator (DPR/DPRD). Apabila anggaran didasarkan pada basis kas, fokus perhatian dari pemerintah dan legislator hanya pada sumber daya berbasis kas.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah basis akrual ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia menunjukkan bahwa pengenalan terhadap basis akrual memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2000, Italia menggunakan basis akrual penuh untuk tingkat lokal dan tidak ada konsideran untuk di tingkat pusat. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang memengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosial masyarakat negara tersebut.

3.4. Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Secara yuridis, keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis

akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Untuk mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2015 nanti, tentu pemerintah kita memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu *necessary condition* dan *sufficient condition*. *Necessary condition* adalah prasyarat yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. Setelahnya, pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*). *Necessary condition* adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana pemeliharaan (www.medinamultimitra.com). Untuk dapat mengimplementasikan basis akrual yang notabene adalah barang baru, dibutuhkan komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD. Di samping itu, SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai juga sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup. Tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak.

Persyaratan tambahan untuk mengubah kondisi menjadi *sufficient condition* tersebut adalah kebijakan akuntansi, prosedur dan teknologi. Pengembangan dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual dibutuhkan untuk mengakomodasi SAP. Idealnya, dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di daerah masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual

penuh. Yang tak kalah penting, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis akrual didalamnya agar implementasi basis akrual ini sesuai dengan harapan.

Kemudian menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) *Hearing*-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009
- 2) Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2015

Setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi penerapan basis akrual di pemerintah daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan.

- 2) Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
- 3) Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan *benchmarking*. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah.
- 4) Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan persepsi dan sosialisasi, cara ini dapat digunakan untuk menyerap *input* berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual.

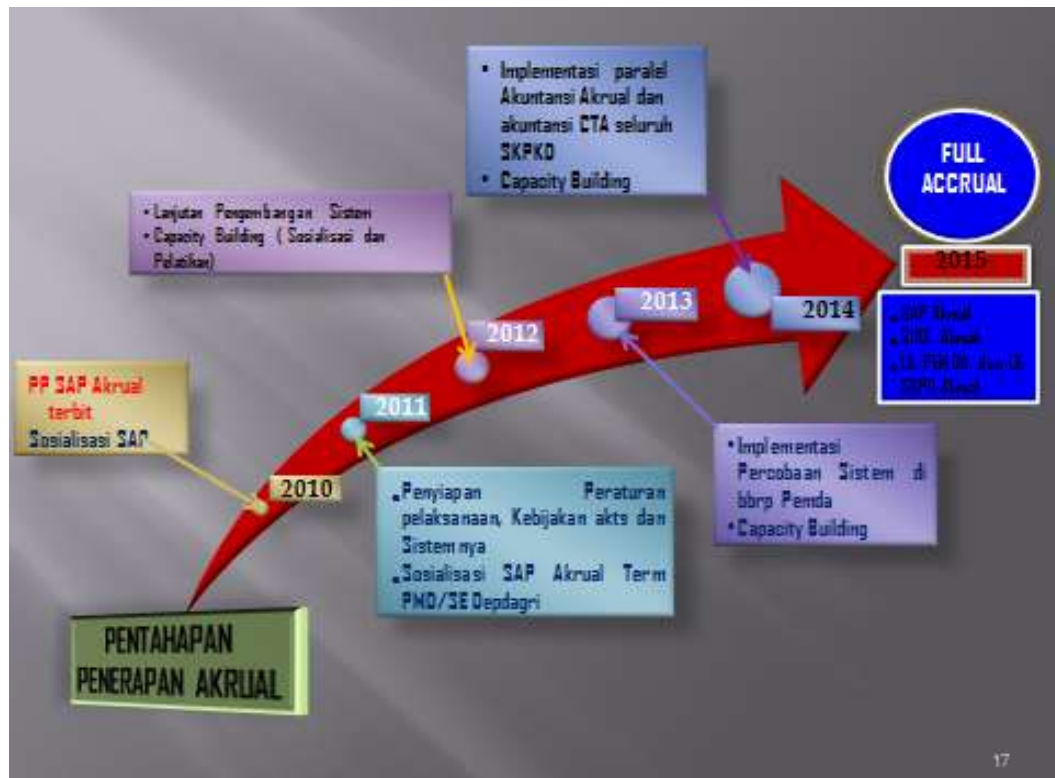
Sementara itu, pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak
- 2) Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
- 3) Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempraktikkan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar dan profesional. Oleh karena itu, KSAP (2010) dalam gambar 2.1 memberikan petunjuk atau gambaran yang jelas

dalam setiap tahunnya untuk hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam pentahapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Gambar 2.1 Pentahapan Implementasi SAP akrual Pemerintah Daerah



Sumber: KSAP (2010)

3.5. Kendala Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Widjajerso (2010) permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan basis akuntansi pada akuntansi pemerintah Indonesia dapat mencakup antara lain sebagai berikut:

1) Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual

Salah satu titik kritis utama dari sebuah penerapan akuntansi berbasis akrual adalah mencakup pendekatan perancangan apakah dapat dilakukan secara bertahap atau langsung secara frontal atau sering disebut *big bang*. Para ahli hampir sepakat bahwa pendekatan bertahap sangat disarankan, terutama bagi pemerintah di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sumber

daya manusia dan komitmen politik dari pimpinan negara yang masih diragukan. Pendekatan ini dirasa paling masuk akal, mengingat konsep akuntansi berbasis akrual harus dipandang sebagai bagian dari sebuah reformasi sistem keuangan negara secara keseluruhan yang harus mencakup reformasi di bidang lain selain hanya masalah akuntansi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan hasil optimal karena pelaporan akuntansi dan keuangan berbasis akrual dirancang secara bersamaan dengan pelaporan berbasis kas, kondisi yang saat ini berlaku. Namun demikian, untuk menghindari hilangnya momentum perubahan menuju basis akrual, langkah total juga disarankan jika kendala-kendala penerapan basis akrual dapat diatasi.

Akhirnya, jika dilihat bahwa penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi manajemen keuangan dan birokrasi, reformasi seperti itu telah digalakkan oleh aparat pemerintah, khususnya kementerian keuangan yang menjadi barisan paling depan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian-kementerian lain dalam birokrasi akan segera mengikutinya, sepanjang perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah budaya organisasi yang lebih akuntabel.

2) Jenis laporan keuangan.

Permasalahan lain adalah jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Secara peraturan undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan, memang hanya mensyaratkan adanya empat laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Di satu pihak, KSAP saat ini telah mengantisipasi jenis laporan tambahan selain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dengan menambahkan tiga jenis laporan baru yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional

dan laporan perubahan ekuitas, seperti tercantum dalam konsep publikasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Di lain pihak, penyusun laporan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sepertinya masih menunggu hasil KSAP, meskipun sudah terlihat aktif dalam berbagai forum seperti *limited hearing* dan diskusi-diskusi basis akrual. Secara nyata, pihak inilah yang nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, mengingat kondisi sekarang saja, mereka masih menghadapi opini *disclaimer* dari auditor. Perubahan-perubahan semacam inilah yang dirasa sangat memberatkan para penyusun laporan keuangan pemerintah. Apakah tidak ada kemungkinan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan pemerintah dan apakah dengan tambahan tersebut memang akan menambah nilai keputusan ekonomi yang diambil entitas akuntansi ataukah biayanya akan jauh lebih besar jika dibanding manfaatnya.

Namun demikian, jika melihat jenis pelaporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada. Seperti misalnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan pengembangan dari laporan realisasi anggaran yang telah dapat disusun oleh sistem yang telah ada, laporan operasional merupakan pengembangan dari laporan realisasi anggaran yang anggarannya tidak dipersyaratkan berbasis akrual menurut perundang-undangan. Dengan demikian cakupan tambahan dari laporan operasional adalah materi pendapatan dan belanja yang non kas. Kemudian laporan perubahan ekuitas dapat dikatakan pengembangan laporan neraca yang dipecah menjadi neraca dan laporan perubahan ekuitas. Kedua laporan tambahan yang diusulkan oleh KSAP yakni laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas tersebut nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan. Jadi, tidak ada alasan jenis laporan akan menambah rumitnya

pekerjaan penyusunan laporan keuangan jika siklus akuntansi yang diolah oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah dipaparkan secara jelas.

3) Anggaran berbasis akrual

Pembahasan akuntansi berbasis akrual hampir selalu diiringi dengan penganggaran berbasis akrual. Pertanyaannya adalah apakah *international best practices* dalam basis akuntansi akrual juga selalu diikuti oleh sistem penganggaran berbasis akrual. Penerapan basis akrual tidak harus diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Alasan utamanya adalah bahwa anggaran berbasis akrual sangat sulit dimengerti oleh para politisi yang fungsinya menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah dan juga para *stakeholders* lainnya.

4) Pengakuan pendapatan

Jika basis akrual diterapkan, pendapatan diakui pada saat timbul hak dari pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang menganut *self assessment* di mana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, hak tersebut menjadi belum *final* karena masih dimungkinkan adanya restitusi meskipun sudah ada SPT, sehingga dokumen yang dijadikan dasar penentuan hak tagih pajak menjadi masalah. Pendapatan harus diakui jika telah muncul hak sehingga pencatatan pendapatan dilakukan setiap kali ada transaksi munculnya hak tersebut. Standar akuntansi pemerintah nantinya harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan pendapatan tersebut. Dengan demikian, pendapatan pajak yang harus diakui adalah jika dapat diukur dan tersedia untuk operasi entitas pelaporan. Contoh jenis pajak yang memenuhi kriteria seperti itu adalah pajak properti, misalnya pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Dalam kondisi itu, pajak properti harus langsung diakui dan dicatat sebagai pendapatan. Untuk jenis pajak yang lain, misalnya pajak penghasilan,

kriteria dapat diukur dan tersedia tetap harus diberlakukan. Jika kedua kriteria tersebut tidak secara bersamaan dapat terpenuhi, pendapatan pajak jenis itu tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Alternatifnya, karena pendapatan pajak mempunyai karakteristik *non exchange revenues*, peraturan perpajakan harus ditafsirkan oleh badan penyusun standar akuntansi pemerintahan kapan memenuhi kriteria *measurable* dan kapan memenuhi *available*. Suatu angsuran pajak, misalnya, yang belum secara definitif dapat dikatakan sebagai hak negara, tidak dapat diakui sebagai pendapatan pajak, kecuali pada jenis usaha tertentu, misalnya pada perbankan yang diwajibkan menyusun laporan keuangan triwulanan dan sekaligus menyampaikan kewajiban pajaknya melalui SPT Masa, dapat diakui sebagai pendapatan pajak oleh pemerintah. Jika SPT mempunyai dasar keterukuran pendapatan pajak dan jika batas restitusi bisa ditentukan, pajak penghasilan baru dapat diakui sebagai pendapatan.

5) Pengakuan belanja/beban

Jika basis akrual diterapkan, penggunaan istilah belanja menjadi tidak tepat, sehingga terminologi belanja seharusnya diganti dengan beban atau biaya. Untuk laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, terminologi belanja sudah tepat dan hal ini juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan untuk laporan lain, yakni, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, terminologi beban atau biaya harus menggantikan terminologi belanja. Dengan demikian, biaya non kas seperti biaya depresiasi akan tercantum dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, karena tidak ada arus kas keluar seperti pada belanja.

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel

memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diidentifikasi tantangan yang mungkin menghambat implementasi akuntansi pemerintahan dan membangun strategi untuk implementasi. Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menurut Simanjuntak (2010:10-12) adalah sebagai berikut:

1) Sistem akuntansi dan *IT based system*

Kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya. Ketidaksiapan sistem akan menyebabkan kegagalan dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang baru dengan basis akrual. Selain itu, perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No 60 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

2) Komitmen dari pimpinan

Setiap perubahan membutuhkan dukungan penuh oleh pimpinan suatu institusi. Hal ini merupakan kunci keberhasilan atas perubahan tersebut. Komitmen yang kuat akan mendorong implementasi secara menyeluruh

perubahan basis akuntansi yang memang tidak mudah. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.

3) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang lebih kompleks dengan batasan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentu saja membutuhkan individu-individu yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai. Namun pada kenyatannya, jumlah sumber daya manusia yang dapat memenuhi tuntutan tersebut masih belum mencukupi. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi agar penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Resistensi terhadap perubahan

Layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi

sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut Satmoko (2010:6-9), kendala penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu sebagai berikut: pertama, kompleksitas laporan keuangan. Laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi bertambah yaitu enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung. Hal tersebut dapat berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar. Kedua, kondisi pemerintah. Kondisi pemerintah meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan keuangan yang mendapat opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga, dampak penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dapat berdampak pada jangka waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan, serta dapat berpengaruh pada jangka waktu pemeriksaan BPK RI mengingat laporan yang harus disiapkan lebih banyak dibandingkan dengan SAP sebelumnya sesuai PP No.24 tahun 2005. Keempat, kondisi pengendalian internal pemerintah yang belum memadai.

3.6. Teori Budaya Organisasi

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi pemerintahan. Pada pemerintahan Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Perubahan standar akuntansi pemerintahan kas menuju akrual menjadi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti yang tersirat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, semuanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat 1.

Menurut Yuwono dan Putra (2005), perubahan organisasi memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, suatu reorientasi fundamental dan radikal dalam cara organisasi beroperasi, kedua, organisasi atau perusahaan yang sedang mengalami transformasi, dan ketiga, mengarahkan atau memimpin orang untuk melakukan sesuatu secara berbeda, atau sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya selama ini. Pada umumnya kita semua mendambakan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Dambaan dan harapan inilah yang terus menerus mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau juga yang memunculkan ketidakpuasan terhadap keadaan sekarang. Menurut Shohib (2010) budaya organisasi dapat di-*manage* dan dikendalikan. Pandangan ini terpecah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pendapat bahwa perubahan budaya organisasi sangat bergantung kemauan para eksekutif dan pendapat yang mengatakan bahwa perubahan hanya mungkin dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan budaya organisasi.

Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai dalam organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh anggota organisasinya

sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku (Sobirin, 2005). Hal ini berarti setiap organisasi mempunyai sistem makna yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan setiap organisasi mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda serta respon yang berbeda ketika menghadapi masalah yang sama. Di samping itu perbedaan sistem makna ini dapat menyebabkan perbedaan perilaku para anggota organisasi dan perilaku organisasi itu sendiri. Akar perbedaan ini bersumber pada asumsi-asumsi dasar yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, filosofi atau ideologi organisasi yang digunakan dalam memecahkan persoalan organisasi.

Menurut Luthans (1998) budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Terdapat empat tipe budaya organisasi yakni: pertama, *bureaucratic culture*, yaitu budaya organisasi yang menekankan pada formalitas, aturan, peran, kebijakan, prosedur, rantai komando, dan pengambilan keputusan yang terpusat. Kedua, *clan culture*, yaitu karakteristik yang dicirikan dengan situasi kekeluargaan, penekanan pada tradisi, loyalitas, ritual, kerjasama tim, dan pengaruh sosial yang kuat dalam lingkup organisasi. Dalam tipe ini sangat diperhatikan proses mentoring, role model, sejarah organisasi, dokumentasi dan membagi perasaan bangga akan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Ketiga, *entrepreneurial culture* yaitu karakteristik yang dicirikan dengan inovasi, kreativitas, pengambilan resiko dan agresivitas dalam mencari peluang. Adanya komitmen untuk bereksperimen, berinovasi dan bersiap untuk menjadi pemimpin. Karyawan memahami bahwa perubahan yang dinamis, inisiatif individu dan kemandirian merupakan standar yang dipraktikkan sehari-

hari. Efektifitas digambarkan dengan tersedianya produk baru dan unik serta diikuti pertumbuhan yang cepat. Keempat, *market culture* yang memiliki karakter pencapaian prestasi yang terukur dan bergantung pada tujuan seperti peningkatan finansial dan *market-based*. Menekankan pada peningkatan penjualan, *market share*, kompetitif dan orientasi terhadap profit. Hubungan karyawan dengan organisasi bersifat kontraktual. Orientasi kontrol lebih formal dan bersifat stabil. Individu bertanggung jawab akan level performa tertentu dan organisasi menjanjikan *level reward* yang spesifik. Bila seseorang dapat meningkatkan level performa maka organisasi menukarkannya dengan *level reward* yang meningkat. Individu tidak menjanjikan loyalitas dan perusahaan pun tidak menjanjikan *security*. Nilai yang berlaku dalam *market culture* adalah *independence*, *individuality*, dan mendorong setiap anggota untuk mencapai tujuan finansialnya masing-masing (Cameron dan Quinn:1999).

Untuk membangun budaya organisasi yang dapat mendukung perubahan organisasi dibutuhkan alat. Alat utamanya adalah komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang sifatnya segala arah tidak hanya dari atas ke bawah saja, sehingga akan memperlancar usaha. Pembangunan budaya organisasi yang baru. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat mengkomunikasikan pentingnya perubahan, menampung saran dan masukan dari anggota organisasi dan hubungan antar anggota organisasi serta meningkatkan keterlibatan anggota organisasi. Tingginya keterlibatan anggota organisasi akan menjamin suksesnya upaya membangun budaya organisasi yang baru sehingga dapat mendukung perubahan organisasi.

Secara umum Paul Bate dalam Shohib (2010) menawarkan 4 (empat) pendekatan perubahan budaya yaitu :

- 1) Pendekatan agresif (*aggressive approach*); perubahan budaya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, non-kolaboratif, membuat konflik, sifatnya dipaksakan, sifatnya *win-lose*, unilateral dan menggunakan dekrit.
- 2) Pendekatan jalan damai (*conciliative approach*); perubahan budaya dilakukan secara kolaboratif, dipecahkan bersama, *win-win*, integratif dan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama
- 3) Pendekatan korosif (*corrosive approach*); perubahan budaya yang dilakukan dengan pendekatan informal, evolutif, tidak terencana, politis, koalisi dan mengandalkan networking. Budaya lama sedikit demi sedikit dirusak dan diganti dengan budaya baru
- 4) Pendekatan indoktrinasi (*indoctrinative approach*); pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru.

3.7. Implikasi pada Individu Dalam Menerima Perubahan

Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi menimbulkan berbagai sikap atau reaksi individu dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Sikap tersebut dapat tertampil secara positif (menerima) maupun negatif (menolak). Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kesiapan individu dan organisasi dalam menghadapi suatu perubahan. Sikap manusia terhadap perubahan turut mempengaruhi efektivitas dari perubahan itu sendiri baik bagi individu tersebut maupun organisasi. Selain itu pula, hanya manusialah yang dapat membuat terjadinya suatu perubahan, baik itu sukses atau tidak dalam perubahan tersebut (Smith, 1996 dalam Mangundjaya, 2002). Oleh karenanya,

mempersiapkan individu serta mengembangkan berbagai kompetensinya diperlukan untuk dapat membantu dalam merencana, mengantisipasi sikap, reaksi, serta dampak dari suatu proses perubahan.

Menurut Bennis dan Chin (1997) dalam Yuwono dan Putra (2005), pandangan bahwa individu akan mudah menerima perubahan apabila ada penjelasan rasional merupakan pandangan umum dalam perubahan organisasi sehingga strategi perubahan organisasi mengikuti pola rasional. Perubahan organisasi selalu menyangkut perubahan individu dan respon individu dalam menyikapi perubahan ini tidak semata-mata rasional tetapi juga melibatkan respon emosional. Emosi yang melekat dalam diri individu sebagai manusia, dalam kajian tentang proses perubahan dalam organisasi dianggap sebagai suatu *nuissance*. Sedangkan reaksi-reaksi emosional individu dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam organisasi dianggap sebagai suatu bentuk *resistance*.

Menurut Robbins (2001), sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional. Sikap resistensi yang dilakukan oleh individu adalah: pertama, kebiasaan yaitu pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita lakukan itu karena kita merasa nyaman dan menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupannya, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Kedua, rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Keempat, yaitu takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar

perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidakpastian dan keragu-raguan. Kalau kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Dan yang terakhir yaitu persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini akan mempengaruhi sikap.

Mengubah budaya bukanlah pekerjaan yang gampang. Dari sudut waktu, perubahan dapat menghabiskan 5 sampai 10 tahun, itupun tingkat keberhasilannya masih dipertanyakan karena respon pegawai terhadap perubahan sangat bervariasi (Sobirin, 2005). Keberhasilan perubahan budaya salah satunya bergantung pada kuat atau tidaknya budaya yang sekarang ada. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya adalah kemauan para anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam perubahan. Dari kedua faktor tersebut Harris dan Ogbonna dalam Sobirin (2005), mengidentifikasi adanya sembilan kemungkinan reaksi pegawai terhadap perubahan budaya organisasi, sembilan kemungkinan respon karyawan terhadap perubahan budaya organisasi dilihat dari keinginan karyawan untuk berubah dan kuat tidaknya sub-budaya organisasi perusahaan. Sembilan reaksi karyawan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, karyawan menerima perubahan apa adanya (*active acceptance*). Di sini karyawan setuju untuk berubah, mau mengadopsi perubahan dan mau berpartisipasi dalam perubahan tersebut tanpa mempertanyakan apakah perubahan itu perlu atau tidak. Kondisi ini terjadi ketika karyawan mempunyai kemauan yang tinggi untuk berubah, dan di sisi lain kohesivitas subbudaya organisasi relatif rendah. Kedua, *selective reintervention*, terjadi ketika kemauan karyawan untuk berubah moderat (tidak tinggi, tidak rendah) tetapi kohesivitas subbudaya organisasi

rendah. *Selective reinvention* bisa diartikan sebagai reaksi karyawan terhadap perubahan budaya di mana karyawan menunjukkan tendensi untuk mendaur ulang, secara selektif, beberapa elemen budaya yang sedang berlaku, seolah-olah menjadi budaya baru. Jadi boleh dikatakan bahwa dengan *selective reinvention* sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti, kadang-kadang hanya artefak saja yang diubah/diberi label baru, tetapi nilai-nilai organisasi yang menjadi inti budaya tidak berubah. Secara selektif, karyawan mencoba mendaur ulang beberapa elemen budaya lama (seolah-olah) menjadi budaya baru meski esensinya tidak ada perubahan, beberapa artefak misalnya diberi label baru. Sementara itu, respon ketiga disebut *reinvention*. Respon ini terjadi ketika kemauan karyawan untuk berubah dan kohesivitas subbudayanya rendah. *Reinvention* bisa diartikan sebagai pura-pura menerima perubahan karena pada dasarnya tidak ada elemen budaya yang berubah. Budaya yang ada hanya ditata ulang seolah-olah membentuk budaya baru. Tidak seperti pada *Selective reinvention* yang mendaur ulang sebagian komponen budaya, pada *reinvention* pendauran ulang ini dilakukan secara menyeluruh. Jadi, bisa dikatakan bahwa *reinvention* merupakan bentuk reaksi karyawan yang lebih radikal dibanding dengan *selective reinvention*.

Keempat, secara umum karyawan mau menerima perubahan (*general acceptance*) terjadi karena kuatnya keinginan untuk berubah, tetapi tingkat kohesivitas sub-budaya cenderung moderat. Dengan *general acceptance* karyawan mempunyai tendensi untuk menerima perubahan hanya terhadap sebagian komponen budaya karena pada dasarnya mereka tidak mau merubah penjiwaan mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang ada. Berbeda dengan *selective reinvention* yang lebih mengandung unsur pendauran ulang budaya, *general acceptance* mengandung unsur menolak sebagian budaya yang ada

terutama pada komponen luar budaya organisasi. Respon kelima disebut *dissonance*, yakni ketika keinginan untuk berubah dan kohesivitas budayanya relatif moderat. Respon ini bisa diartikan sebagai *a state of cognitive imbalance*, terjadinya ketidakseimbangan kognitif akibat adanya usaha perubahan budaya. Kondisi ini ditandai dengan kebimbangan karyawan antara menerima dan menolak perubahan dan tindakan-tindakan karyawan yang tidak konsisten. *General rejection*, penolakan secara umum adalah bentuk keenam dari respon karyawan terhadap perubahan budaya. Respon ini terjadi ketika keinginan untuk berubah rendah tetapi kohesivitas budaya moderat. Berbeda dengan *general acceptance* yang mau menerima perubahan meski tidak sepenuhnya, *general rejection* secara umum menolak perubahan yang ditandai dengan adanya ketidakpercayaan karyawan terhadap pimpinan organisasi dan penolakan untuk mengadopsi budaya yang baru.

Ketujuh adalah *reinterpretation*. Terjadi jika keinginan berubah dan kohesivitas sub-budaya sama-sama tinggi. *Reinterpretation* bisa diartikan sebagai reaksi atas perubahan budaya yang ditandai dengan kecenderungan untuk menerjemahkan budaya yang baru dalam bentuk pengembangan nilai-nilai organisasi dan pola perilaku yang sesuai baik dengan budaya lama maupun budaya baru. Di sini para karyawan akan berusaha untuk menyesuaikan perilakunya agar selaras dengan tujuan perubahan. Kedelapan, adalah respon yang terjadi jika keinginan karyawan untuk berubah moderat tetapi tingkat kohesivitas sub-budaya sangat tinggi. Respon ini disebut *selective reinterpretation* yang bisa diartikan sebagai reaksi perubahan yang melibatkan penolakan terhadap perubahan dan secara selektif melakukan reinterpretasi terhadap beberapa atribut budaya. Dibandingkan dengan *reinterpretation* yang cenderung merupakan tanggapan yang radikal, *selective reinterpretation*

melibatkan beberapa perubahan saja. Terakhir, kesembilan, adalah *active rejection* yang terjadi jika keinginan berubah sangat rendah dan sebaliknya kohesivitas subbudaya yang ada sangat tinggi. Di sini karyawan serta merta menolak perubahan budaya, baik cara yang digunakan maupun komponen budayanya. *Active rejection* dengan demikian merupakan kebalikan dari *active acceptance*, oleh karenanya *active rejective* merupakan reaksi yang paling tidak diharapkan.

3.8. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian tentang kendala dalam penerapan basis akrual pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih terbatas.

Penelitian Arliana (2011) bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal. Responden dalam penelitian sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari pegawai KPKNL Makassar. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai KPKNL Makassar serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai KPKNL Makassar sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada KPKNL Makassar yang sangat terbantu

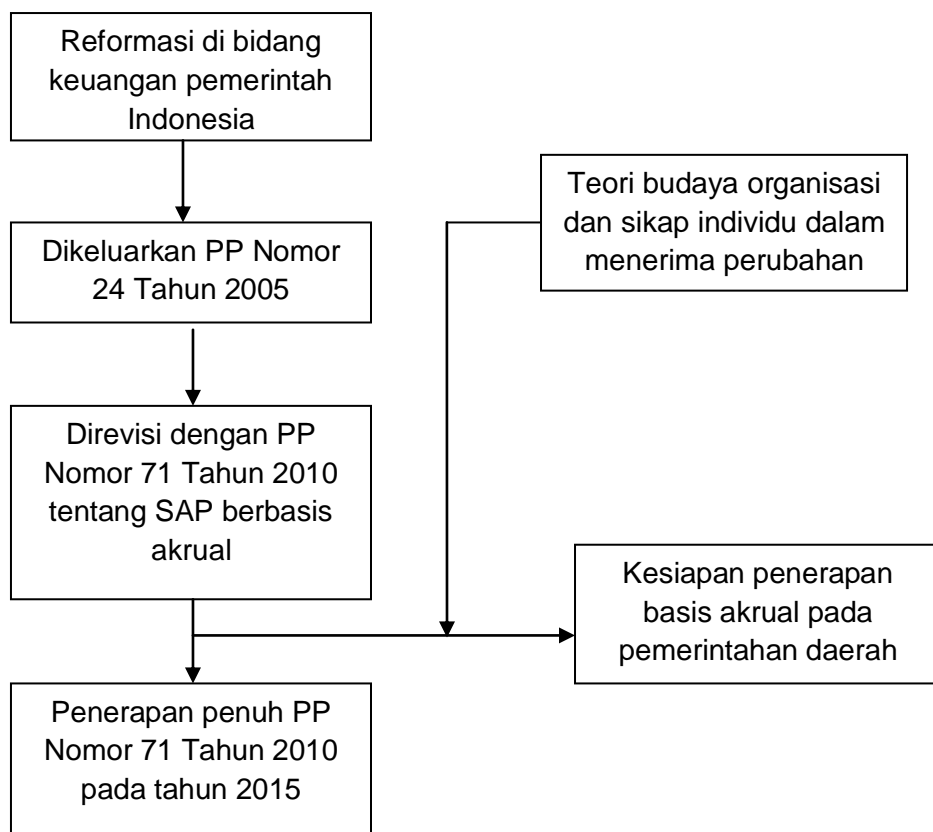
dengan adanya sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang implementasi basis akrual yang lebih awal yaitu: integritas, profesionalisme (akuntabilitas dan komitmen), sinergi, pelayanan (ketulusan dan transparansi), serta kesempurnaan.

Penelitian yang dilakukan Damanik (2011) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada pemerintah Kota Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.604 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala penerapan SAP mempunyai hubungan yang kuat sebesar 60.4%.

Penelitian Sulani (2010) bertujuan untuk: (a) mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 tahun 2005, yaitu sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya, (b) mengetahui seberapa besar pengaruh dari sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, (c) mencoba memberikan saran-saran yang dapat membantu pemerintah kabupaten dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi khususnya masalah yang diteliti yaitu keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, komitmen

dan perangkat pendukungnya. Penelitian skripsi menggunakan desain asosiatif kausal dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Hasil penelitian menemukan bahwa (a) sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya mampu menjelaskan keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 sebesar 36,5%, (b) sumber daya manusia, komitmen, dan perangkat pendukungnya secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, (c) secara parsial, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005.

3.9. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005:6):

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Menurut Newman (1997:62) dalam Erna (2008) terdapat tiga pendekatan, yaitu positivisme, interpretif, dan kritis. Ketiganya memiliki tradisi yang berbeda dalam teori sosial dan teknik penelitiannya. Dengan menggunakan paradigma interpretif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung mengobservasi.

Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan pemerintah Kota Makassar menuju penerapan standar akuntansi pemerintahan baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Realita mengenai kesiapan menuju penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kota Makassar ini didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar,

kendala yang dihadapi menuju implementasi, serta respon organisasi dan sikap individu/pegawai dalam menerima perubahan SAP berbasis akrual. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yaitu kepala bagian keuangan dan pegawai pada SKPKD dan SKPD Kota Makassar.

3.2. Kehadiran Peneliti

Menurut Sugiyono (2010:2) dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Adapun instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung.

3.3. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu Kota Makassar, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Selama ini pemerintah Kota Makassar menyusun laporan keuangan dengan menganut standar

akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. Kehadiran PP 71 tahun 2010 mengharuskan pemerintah Kota Makassar untuk mengubah haluan menjadi basis akuntansi akrual. Oleh karena itu, kota ini menjadi objek yang menarik untuk diteliti bagaimana kesiapannya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1) Observasi (pengamatan).

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2010:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

2) *Interview* (wawancara).

Menurut Moleong (2005:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan *key informan* yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas informasi yang disampaikan. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Objek Penelitian pada Pemerintah Kota Makassar

No.	NAMA	JABATAN
1	Ahdi Abidin Malik	Kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar
2	Yuni	Pegawai bagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar
3	Iswady	Kepala subbagian keuangan dinas pendapatan daerah Kota Makassar
4	Syafril Anshary	Pegawai bagian keuangan dinas kesehatan Kota Makassar
5	Taslim Rasyid	Kepala subbagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar
6	Fausyiah Anwar	Pegawai bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar

Sumber: penulis

3) Dokumentasi.

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Makassar menuju penerapan akuntansi berbasis akrual.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
- 2) Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
- 3) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
- 4) Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi,

dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.7. Pengecekan Validitas Temuan

Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya. Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2010:121) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
- 2) Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 3) Menggunakan bahan referensi, bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara ataupun foto-foto sehingga lebih dapat dipercaya.

3.8. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa dilakukan atau

tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi. Dengan terlebih dahulu membuat permohonan ijin penelitian ke tempat penelitian.

Langkah-langkah penelitian selanjutnya diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara dan alat perekam untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar. Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91) untuk dibuat laporan penelitiannya. Peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teori budaya, yaitu secara aktif menginterpretasikan data-data yang terkumpul terkait dengan perubahan budaya mengenai peralihan penggunaan standar akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju akrual ke basis akrual penuh sesuai dengan apa yang didapat oleh peneliti dalam proses penelitiannya. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV

Kesiapan Penerapan Basis AkruaI pada Pemerintahan Kota Makassar

3.1. Makna Basis AkruaI dalam Pemerintah Kota Makassar: Kompleksitas Laporan Keuangan

Kehadiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Rata-rata pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah matang akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Iswady selaku kepala subbagian keuangan dinas pendapatan daerah Kota Makassar melihat basis akrual sebagai peristiwa ekonomi yang meskipun belum ada uang masuk ke kas daerah, tetapi sudah ada yang mengikat antara wajib pajak dan petugas pajak pada saat itu bisa diakui sebagai pendapatan. Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Anwar, seorang pegawai bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

Kalau pemahaman saya tentang basis akrual itu suatu standar, standar pemerintahan yang dimana mengakui kejadian ekonomi itu pada saat terjadinya kejadian tersebut. Bukan pada saat menerima kas.

Pandangan responden di atas telah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dari pandangan kedua informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa rata-rata pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar telah menyadari adanya pergantian standar akuntansi pemerintahan yang saat ini berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga diperkuat dengan pemaparan yang diuraikan oleh Rasyid yang menjabat sebagai kepala subbagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar. Beliau mengatakan:

Hanya saja perbedaannya kalo akrual basis di LRA juga harus diakrualkan, sebelumnya di *cash basic* yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan kita *cash*, nanti di neraca kita lakukan itu akrualnya. Tapi sekarang seluruhnya sudah harus diakrualkan. Sederhana akrualnya kan kita langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui. Pada saat akhir tahun kemudian pendapatan tidak mampu dipenuhi berarti itu menjadi piutang. Begitu juga di belanja, sebenarnya itu saja buktinya itu akrual hanya saja jurnalnya yang banyak kali. Kalau tidak salah empat kali jurnal sampai dengan tahap pelaksanaannya pencairan dananya.

Beliau kemudian melanjutkan untuk menegaskan:

Karena kalau saya lihat sebenarnya yang berbeda cuma persoalan jurnal pengakuan awal. Yang tadinya kita ke *cash basic* untuk pendapatan dan belanja dan sekarang kita akrualkan. Sederhana sebenarnya, yang tadinya nanti kita akui setelah ada kasnya ada uangnya masuk ke kas daerah nah sekarang tidak, pada saat penetapan APBD itu sudah menjadi tercatat sebagai utang atau piutang. Itu saja perbedaan mendasarnya.

Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa para pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar pada umumnya telah memahami pengertian dasar dari akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun, ketika pelaksanaan basis akrual dalam pemerintahan Kota Makassar diangkat dalam permukaan, masalah mengenai laporan keuangan yang dihasilkan menjadi bertambah seolah-olah menjadi topik utama yang menjadikan basis akrual ini sebagai sesuatu hal yang rumit.

Pemahaman mengenai implementasi basis akrual khususnya untuk pemerintah Kota Makassar, bagi Malik, kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar, mengungkapkan bahwa:

Sudah beberapa pelatihan yang saya ikuti memang untuk akrual itu sangat rumit. Kita buat dua laporan keuangan. Di PP 24/2005 artinya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, LRA, catatan atas laporan keuangan, dan *cash flow*. Tetapi di PP 71 ini ada tambahan 3 item lagi yang kita harus buat, jadi saya rasa untuk PP 71 ini akan lebih sulit lagi istilahnya bantu pemerintah untuk urusi daerah itu lebih rumit. Harus ada memang orang yang berkompetensi yang bisa membimbing daerah itu.

Pernyataan beliau di atas menguatkan pandangan bahwa dengan bertambahnya item yang akan dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan, menjadi masalah utama bagi para pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Menurut Halim dan Kusufi (2012:44), setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut. pertama, pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari: laporan

realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Kedua, pelaporan finansial (*financial reports*) yang terdiri dari: neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Ketiga, catatan atas laporan keuangan (CALK). Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 sudah sewajarnya memerlukan orang atau lembaga yang berkompetensi dalam membimbing daerah tersebut akibat dari kerumitan yang ditimbulkan, artinya sosialisasi terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini harus gencar dilaksanakan. Hal yang sama dikemukakan Anshary, seorang pegawai bagian keuangan dinas kesehatan Kota Makassar:

Bertambah laporannya, ada laporan kas, laporan operasional dan laporan ekuitas. Tentunya perlu lagi sosialisasi karena kerumitannya.

Mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, Yuni seorang pegawai bagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar mengemukakan:

Kalo menurut saya lebih ribet memang pakai PP 71 karena bukan cuma laporannya tapi karena analisisnya juga beda, kalo pendapatan itu jurnalnya dia cuma bisa pakai *single* saja tapi kalo 71 banyak buku besarnya begitu kayak perusahaan dagang.

Ungkapan di atas, jelas memandang basis akrual dalam pemerintahan khususnya pada pemerintah daerah sebagai suatu hal yang kompleks. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan). Oleh karena itu, persamaan akuntansi pada umumnya hanya berlaku untuk pelaporan finansial saja tidak untuk pelaporan pelaksanaan anggaran. Menurut Halim dan Kusufi (2012:180), penerapan SAP berbasis akrual dengan menggunakan sistem

pencatatan *double entry* melibatkan dua macam penjurnalan untuk setiap transaksi, yaitu jurnal finansial (untuk pelaporan finansial) dan jurnal anggaran (untuk pelaporan pelaksanaan anggaran). Jurnal finansial dilaksanakan mirip dengan pencatatan yang dilakukan pada akuntansi sektor privat, sedangkan jurnal anggaran mencatat transaksi pendapatan-LRA dan belanja dengan akun "SILPA" sebagai pengganti akun "kas", sebagaimana yang dicontohkan oleh KSAP. Ketidakterkaitan pelaporan anggaran dengan pelaporan finansial menunjukkan bahwa pencatatan pelaksanaan anggaran terpisah dengan akuntansi keuangannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencatatan anggaran terpisah dari pencatatan akuntansinya, sehingga pencatatan anggaran hanya ditujukan untuk menghasilkan pelaporan pelaksanaan anggarannya saja yaitu, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di sisi lain, bagi Satmoko (2010:2), menjelaskan bahwa bertambahnya laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung akan berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar.

Secara nyata, pemerintah Kota Makassar berpandangan bahwa mereka nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, mengingat kompleksitas dari laporan keuangan yang akan dihasilkan, yang semula hanya empat laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan dan kemudian bertambah menjadi tujuh laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari pandangan Malik yang menyatakan bahwa:

Kalau kami di akuntansi keuangan menghasilkan 4 laporan keuangan, setelah akrual sudah berjalan, saya lihat ada 8 atau 7 itu laporan keuangan. Sebagian kecil SKPD di Makassar yang tidak punya konsultan untuk PP 24 masih kesulitan begitupun untuk sebagian kecil SKPD kecamatan. Itu saja kalau laporan keuangan, kami bagian keuangan yang membantu buat, panggil ke sini buat neraca ini.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, kondisi pemerintah Kota Makassar saat ini, dalam implementasi peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual saja masih perlu adanya pembelajaran untuk sebagian aparat daerah khususnya di SKPD kecamatan. Bagi SKPD yang ruang lingkupnya tidak besar seperti SKPD kecamatan, kehadiran peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dinilai sangat menyulitkan. Hal tersebut berangkat dari pemahaman SDM terhadap peraturan pemerintah yang lama saja belum stabil, terlebih ketika ingin diterapkannya peraturan pemerintah yang baru dengan laporan keuangan yang harus disajikan menjadi bertambah.

Wawancara yang dilakukan dengan Yuni, seorang pegawai bagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar yang mengatakan:

Laporannya akan lebih banyak. Ada pakai beban sementara kalau PP 24 yang dipakai sekarang itu cuma pakai biaya atau belanja, sama pendapatannya juga ada dua kalau tidak salah yah.

Berdasarkan pernyataan pegawai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah baru juga menjadi bahan pertimbangan bagi SKPD dan SKPKD Kota Makassar dalam tambahan pembelajaran mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, istilah seperti “beban” baru dikenal setelah berlakunya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (PP 71/2010) yang disajikan pada laporan operasional dan dibedakan dengan “belanja” yang disajikan pada laporan realisasi anggaran. Akibat berlakunya

peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, akun “pendapatan” dibedakan menjadi “pendapatan-LO” yang dicatat menggunakan basis akrual dan disajikan dalam laporan operasional, dan “pendapatan-LRA” yang dicatat menggunakan basis kas dan disajikan dalam LRA. Istilah “ekuitas dana” sudah tidak lagi digunakan karena beban (dulunya belanja) dan pendapatan sudah menggunakan basis akrual sehingga pelaporan keuangan pemerintah dianggap sudah seperti pada sektor bisnis (Halim dan Kususfi, 2012:46).

Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pelaporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi bertambah kuantitasnya hingga dua pelaporan yaitu pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Pelaporan finansial (*financial reports*) yang terdiri dari: neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Walaupun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan. Namun, bagi para pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar, kompleksitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh PP 71/2010 semakin nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan). Pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut dengan *extra countable* atau pencatatan terpisah antara akuntansi

dengan anggaran. Dengan demikian, hal ini pastinya memerlukan analisa yang berbeda.

3.2. Kesiapan SAP AkruaI: Refleksi Formalitas

Ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Walaupun, entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual.

Mencermati seputar penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang diharuskan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Malik selaku kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar, mengemukakan:

PP 71 ini bagi daerah memang asing, artinya produk baru, jadi kita masih tanda tanya bisa nggak buat seperti ini. Tapi kalau kami lihat, makassar pasti ikut dan saya lihat provinsi juga kemarin mulai jalan, kami juga pemerintah Kota Makassar di tahun 2013 kami revisi dulu perwalinya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan serta sistem kebijakan akuntansinya, artinya di 2013 kami akan revisi untuk persiapan menghadapi PP 71 di 2015 nanti.

Beliau juga mengatakan:

Salah satu *top* akuntansi yang dari UGM, dia S3 nya dari Amerika. Dia sempat mengatakan tentang *accrual*, apakah *accrual* ini bisa dipertanggungjawabkan katanya di depan Allah SWT. Ini sudah S3 dari akuntansi Amerika belum berani menerapkan akrual di Indonesia, saking beratnya dan tanggung jawabnya katanya. Tapi namanya institusi yah semua daerah harus ikut dalam hal itu. Cepat atau lambat pasti kita ikut, cuma batas penerapannya paling lambat 2015 dan sudah seragam semua.

Mengingat standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan produk baru, maka sangatlah jelas bahwa baik itu Malik maupun para pengelola keuangan lain di pemerintahan Kota Makassar meragukan keberhasilan dari penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ini. Para aparatur ini cenderung untuk tidak percaya diri akan kemampuan mereka dalam menganut basis akrual tersebut. Namun, secara realita bahwa pemerintah Kota Makassar harus ikut andil dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ini. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan oleh sekretariat Kota Makassar selaku SKPKD untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah sosialisasi untuk semua SKPD yang ada di pemerintahan Kota Makassar serta merevisi peraturan walikota tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan yang akan dilakukan pada tahun 2013.

Analisa sosial lain diungkapkan Iswady, seorang kepala subbagian keuangan dinas pendapatan daerah Kota Makassar, beliau memandang persiapan awal yang dilakukan untuk mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku saat ini sebaiknya adalah dengan merevisi peraturan daerah:

Sebelumnya itu sudah ada perda kita tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, terus ada peraturan walikota tentang sistem dan prosedur di mana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terus ada peraturan walikota Nomor 69 tahun berapa saya lupa tahun berapa tentang standar akuntansi pemerintah untuk lingkup Kota Makassar, didalamnya itu mengatur bahwa basis kita adalah kas modifikasi. Kalau memang mau berubah mengikuti PP, kita siapkan dulu draf nya sebagai instrumen dasar hukum untuk pelaksanaannya, akan merevisi tentang peraturan walikota kita.

Dari pandangan pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar di atas, menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan untuk implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual hanyalah refleksi dari bentuk formalitas. Hal tersebut berangkat dari adanya peraturan pemerintah yang melandasi perubahan ini yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sehingga pemerintah daerah wajib melaksanakan amanah yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar mengikuti aturan main peraturan pemerintah tersebut dengan jalan merevisi terlebih dahulu peraturan yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur. Dengan demikian, tepatlah yang diungkapkan KSAP (2010) bahwa persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah adalah dengan penyesuaian peraturan. Penyesuaian peraturan dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dilakukan hanya sebagai wujud kepatuhan kepada peraturan, seolah-olah hanya sekedar mengikuti format dan alur hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Pemerintah Kota Makassar terkesan hanya menjalankan kewajibannya sesuai amanah peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dengan melakukan persiapan-persiapan seperti sosialisasi untuk semua entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintahan Kota Makassar serta penyiapan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah

tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur. Namun demikian, persiapan strategi tersebut yang dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kota Makassar berjalan dengan lambat dan tidak sesuai dengan pentahapan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah versi KSAP.

Sepatutnya menurut KSAP (2010), pada tahun 2010 telah diadakan sosialisasi mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pada tahun 2011 penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 dilakukan *capacity building* atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian pada tahun 2013 implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada tahun 2014 dilakukan implementasi *parallel* akuntansi akrual dan akuntansi kas menuju akrual untuk seluruh SKPKD hingga penerapan basis akrual penuh pada tahun 2015.

Realitanya, hingga saat ini pemerintah Kota Makassar hanya melakukan sosialisasi awal tentang peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Revisi regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur pengelolaan keuangan Kota Makassar baru akan dilaksanakan pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Makassar tidak secara serius untuk menanggapi perubahan standar akuntansi pemerintahan ini. Idealisme yang diinginkan oleh perubahan standar akuntansi pemerintahan ini belum tercapai. *Mindset* para aparatur tersebut hanya terletak pada kendala yang kira-kira akan mereka lalui. Seperti jenis-jenis laporan

keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah Kota Makassar.

Selama ini, secara formalitas pemerintah Kota Makassar dalam persiapan menuju standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual diwujudkan dengan langkah pemberian sosialisasi atau pelatihan mengenai apa itu akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sosialisasi atau pelatihan diberikan dengan maksud untuk memberi pemahaman yang lebih luas kepada pihak-pihak pengelola keuangan pemerintahan Kota Makassar dalam hal ini SKPD-SKPD Kota Makassar tentang basis akrual dari segi sektor publik. Walau secara nyata pemerintah Kota Makassar hingga saat ini hanya mengikuti sosialisasi atau pelatihan dengan pertemuan satu atau dua kali saja. Namun, dari pertemuan tersebut kebanyakan pegawai dari SKPD-SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar mengetahui keberadaan dari peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hal ini tercermin dari pernyataan Anshary selaku pegawai bagian keuangan dinas kesehatan pemerintah Kota Makassar yang menyatakan bahwa “secara umum pas sosialisasi sebenarnya kita tahu ada PP 71 ini”. Konsep dasar dari standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual pun telah disuguhkan kepada para aparatur pemerintahan Kota Makassar.

Bagi Malik, fakta di atas tersebut dipandang sebagai langkah awal dalam persiapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diwajibkan untuk diimplementasikan. Beliau mengatakan:

Kita dari tahun 2010 sudah terima di internet baik juga dari Depdagri tentang PP 71 ini yang inti di dalamnya itu akuntansi berbasis akrual. Di 2011 kita sudah sosialisasikan kepada semua SKPD. Jadi artinya di tahun 2013 nanti ini kita sudah ada kegiatan untuk persiapan menuju ke PP 71.

Sosialisasi atau pelatihan wajib diberikan sebagai usaha penyamaan persepsi dan dapat digunakan untuk menyerap *input* berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual (KSAP, 2010). Sosialisasi atau pelatihan merupakan asupan yang senantiasa diberikan, karena adanya berbagai opini yang terdengar di telinga para khalayak mengenai ketidakmampuan tenaga kerja yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Hal ini terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan Malik selaku kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar, mengemukakan:

Saya rasa kendala tidak kami temukan cuma waktu saja. Artinya begini, kendala sih ada khususnya SDM yang ada di pemerintah kota makassar ini masih terbatas, terbatas dalam artian yang kami kenal di pemerintah kota Makassar cuma yang daerah kita pakai yaitu PP 24.

Selain itu, beliau juga mengatakan:

Karena rata-rata di SKPD atau PPKSKPD belum mengerti apa itu akrual. Yang dia kenal hanya PP 24 standar akuntansi pemerintahannya. Sebagian kecil SKPD di makassar yang tidak punya konsultan untuk PP 24 masih kesulitan begitupun untuk SKPD kecamatan.

Dari wacana-wacana yang diungkapkan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa pemerintah Kota Makassar melakukan persiapan-persiapan yang mengarah ke implementasi basis akrual dengan lebih intens melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada jajaran staf dan pejabat pemerintahan Kota Makassar serta penyesuaian peraturan lokal pada tahun 2013. Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk formalitas dari pemerintah Kota Makassar sendiri dalam menyikapi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah Kota Makassar terkesan hanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini maka peraturan

tersebut yang akan diikuti oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Makassar. Hal ini merupakan tontonan abadi yang akan dilihat pada sektor publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan maka pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan pemerintah Kota Makassar untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.

BAB V

Teori Budaya Organisasi dan Sikap Individu dalam Menerima Perubahan

4.1. *Bureaucratic Culture*: Ranah Budaya Organisasi Pemerintah Daerah

Reformasi keuangan negara terjadi dalam proses yang relatif cepat sehingga membuat banyak aparatur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu beradaptasi terutama pada budaya organisasi sektor publik. Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik, dan budaya yang ada di tingkat pemerintah daerah merupakan budaya organisasi. Resep utama budaya organisasi adalah interpretasi kolektif yang dilakukan oleh anggota-anggota organisasi. Menurut Luthans (1998) budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya.

Budaya organisasi yang terwujud dalam sistem organisasi pemerintah daerah dapat menjadi pedoman aparturnya untuk menjalankan setiap programnya. Pada dasarnya, pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar bersifat hierarki. Artinya, segala keputusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar akan bersumber dari ketetapan pemerintah pusat. Gambaran tersebut dapat dijumpai dari wawancara dengan Malik, seorang kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat daerah Kota Makassar, yang memandang keharusan adanya implementasi dalam setiap perubahan dalam institusi pemerintahan dengan menyatakan:

Mau tidak mau sebagai institusi atau lembaga, kita harus ikuti apa yang diperintahkan oleh departemen dalam negeri karena kita kan selaku pemerintah daerah.

Pandangan yang sama juga diungkapkan Anwar selaku pegawai dari bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar, mengatakan:

Perubahan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru artinya sudah seharusnya kita laksanakan karena ini sudah dalam bentuk peraturan pemerintah dek.

Berdasarkan pandangan dari Anwar tersebut dapat dikatakan bahwa ketika perubahan budaya secara nyata terjadi dalam pemerintah daerah secara keseluruhan, maka akan dibarengi dengan terbitnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah setelah diterbitkan dan disahkan, tentunya akan bersifat wajib untuk seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah dari peraturan pemerintah tersebut.

Dari pandangan pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar di atas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah Kota Makassar menganut budaya organisasi yang bertipe *bureaucratic culture*. Sebagaimana pengetahuan pada umumnya yang menyatakan bahwa birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Berangkat dari pernyataan bahwa pada umumnya pemerintah Kota Makassar selaku organisasi sektor publik yang bersifat hierarki maka segala sesuatunya diputuskan di pusat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Cameron dan Quinn (1999) bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan Kota Makassar dilakukan secara terpusat dan menekankan pada aturan atau kebijakan yang ada.

Menurut Cameron dan Quinn (1999), agen pemerintahan merupakan contoh dari organisasi yang memiliki budaya birokratik. Individu yang sesuai

dengan budaya ini dicirikan dengan karakteristik yang lebih menyukai adanya kepastian aturan, hierarki yang jelas dan prosedur yang kaku dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hal ini diperkuat dari wawancara yang dilakukan dengan Iswady, seorang kepala subbagian keuangan dinas pendapatan daerah Kota Makassar yang mengatakan:

Kalau kita di tingkat SKPD sebenarnya posisinya menerima apapun itu yang menjadi aturan. Karena kalau sudah menjadi aturan kita harus ikuti sisa bagaimana kita menambah wawasan menambah kualitas kita untuk bisa memahami aturan terbaru tersebut.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Makassar memiliki ketentuan dan aturan main tertentu, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah daerah setempat, maupun dari pemerintah pusat, yang mengikat seluruh aparatur daerah dalam berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Pada tipe budaya organisasi ini, semua individu yang terlibat memiliki kewajiban dalam mengikuti semua aturan main dari peraturan yang diterapkan dalam organisasi pemerintahan. Adanya peraturan pemerintah baru yang telah diterbitkan dan disahkan, maka secara otomatis tindak tanduk dari individu dalam pemerintahan harus berkiblat pada peraturan pemerintah yang baru tersebut.

Budaya organisasi terdiri dari dua komponen yaitu: nilai (*value*) yakni sesuatu yang diyakini oleh warga organisasi dalam mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, dan keyakinan (*belief*) yakni sikap tentang cara bagaimana seharusnya bekerja dalam organisasinya. Pemerintah Kota Makassar meyakini dan menganut sepenuhnya pada nilai kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, dengan adanya faktor tersebut pemerintah Kota Makassar semakin didorong untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah terbaru sebagai wujud dari adanya perubahan budaya dalam organisasi sektor publik.

Merujuk pada salah satu pernyataan di atas yang menyatakan bahwa institusi atau lembaga pemerintah mau tidak mau harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh departemen dalam negeri mengindikasikan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan nilai kepatuhan hukum. Nilai kepatuhan hukum tersebut merupakan nilai yang berhubungan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Nilai kepatuhan hukum ini merupakan pedoman bagi setiap warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi, dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar, mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai wujud dari nilai kepatuhan hukum.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 secara nyata akan dibarengi dengan perubahan pada organisasi. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi selalu membayangi pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah, sehingga basis akrual pada pemerintahan selalu diperbincangkan untuk segera diimplementasikan. Selain itu, ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) mengamanatkan penggunaan basis akrual, oleh karenanya KSAP menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005.

Perubahan budaya dalam organisasi sektor publik pada umumnya cepat atau lambat akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena kultur tersebut sudah mengendap pada pikiran masing-masing anggota organisasi, tetapi karena kultur tersebut telah terkristalisasi ke dalam sistem organisasi yang telah mereka bangun bersama. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Makassar memandang

peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini menjadi suatu kewajiban karena adanya legitimasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang telah disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rasyid sebagai kepala subbagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar berpendapat bahwa:

Perubahan dalam pemerintah harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Masak tidak dilaksanakan padahal ini sudah ada PP. Setelah undang-undang itu kan PP urutan kedua, begitu tingginya itu PP diterjemahkan lagi ke permendagri dari situ diterjemahkan lagi ke peraturan daerah kemudian ke peraturan walikota.

Pandangan Rasyid lahir dari fakta dunia organisasi sektor publik di Indonesia khususnya pada pemerintah daerahnya, yang segala aksi dari para aparat birokrasi dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku dalam pemerintahan tersebut. Asumsi dasar pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Makassar bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini, maka aturan tersebut yang akan dilaksanakan baik itu secara gradual ataupun frontal.

Perubahan kali ini dilakukan karena untuk menyesuaikan perkembangan peraturan pemerintah yang baru. Sebagai contoh, dalam hal ini peneliti merujuk pada perubahan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang memayungi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang telah berubah kemudian direvisi dengan munculnya peraturan pemerintah yang baru yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Seperti sudah diketahui bersama pada tahun 2003 pemerintah telah mengundang paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang salah satunya adalah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang di dalamnya diamanatkan pula penggunaan basis akrual. Oleh karena itu, untuk konsistennya penerapan peraturan perundangan tersebut maka peraturan

pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual tentu harus diubah.

Perubahan peraturan pemerintah ini seakan-akan dilakukan dengan pendekatan yang agresif, sesuai dengan yang diungkapkan Paul Bate dalam Shohib (2010) yang mengatakan bahwa pendekatan perubahan dapat dilakukan dengan pendekatan agresif, yaitu perubahan budaya yang menggunakan pendekatan kekuasaan, non-kolaboratif, membuat konflik, sifatnya dipaksakan, sifatnya *win-lose*, *unilateral*, dan menggunakan dekrit. Reaksi ini memunculkan komentar bahwa pemerintah terkesan senang mengubah suatu peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang memiliki kekuasaan dengan mengubah peraturan dalam waktu yang relatif singkat, dan pada akhirnya pasti akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemunculan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, menyebabkan Yuni seorang pegawai bagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar mengatakan:

Sekarang memakai PP 24 dan PP yang itu saja masih mau dipelajari.

Dari pandangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ungkapan yang sering muncul seperti kami belum selesai mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, sudah muncul peraturan baru yang tampak lebih rumit dari sebelumnya. Hal ini juga dapat terlihat pada pemerintah Kota Makassar, yang baru pada tahun 2009 menerbitkan peraturan daerahnya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Kemudian seketika muncul peraturan pemerintah baru yang mengharuskan implementasi basis akrual pada pemerintah Kota Makassar yang pada intinya hal pertama yang harus dilakukan untuk menerima kehadiran peraturan pemerintah yang baru ini adalah dengan merevisi peraturan daerah sebelumnya.

Berdasarkan wacana-wacana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diungkapkan bahwa *bureaucratic culture* merupakan ciri khas yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai identitas dari organisasinya. Pemerintah Kota Makassar senantiasa untuk melakukan segala program kerjanya berdasarkan atas keputusan dari pemerintah pusat. Tipe budaya ini menyebabkan perubahan budaya pasti akan terjadi baik itu secara frontal maupun gradual. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut didukung dengan adanya aturan dan kebijakan serta undang-undang yang mengikat. Nilai kepatuhan hukum memberikan pengaruh yang kuat bagi aparatur pemerintah Kota Makassar dalam bertindak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

4.2. Sikap Positif dan Negatif: Reaksi Individu Terhadap Perubahan Budaya

Pada umumnya setiap anggota dalam organisasi adalah pihak yang terkena dampak secara langsung ketika perubahan budaya organisasi terjadi. Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi menimbulkan berbagai sikap atau reaksi individu dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Sikap tersebut dapat terlihat secara positif (menerima) maupun negatif (menolak). Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kesiapan individu dalam menghadapi suatu perubahan. Pada saat perubahan budaya terjadi dalam pemerintahan, sikap aparatur pemerintah daerah juga tercermin dalam berbagai bentuk tindakan mereka. Sikap positif yang tercermin dalam menerima perubahan budaya dalam organisasi sektor publik diperkuat dengan pemaparan yang diuraikan oleh

Anwar, seorang pegawai bagian keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar.

Beliau mengatakan:

Secara pribadi, karena kebetulan kerja dalam instansi pemerintahan, maka pastinya kita ikuti perubahan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak apa-apa juga selama perubahan itu untuk kebaikan dan selama perubahan itu bagus.

Rasyid, seorang kepala subbagian keuangan sekretariat DPRD Kota

Makassar juga berpendapat bahwa:

Perubahan dalam pemerintah harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Masak tidak dilaksanakan padahal ini sudah ada PP. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang harus dilaksanakan apalagi nanti kalau ada sanksi.

Pandangan kedua informan tersebut di atas, menunjukkan bahwa segala perubahan budaya yang terjadi dalam organisasi sektor publik utamanya dalam lingkup pemerintahan pastinya akan tetap dijalankan oleh para aparatur pemerintahan. Pengelola keuangan pemerintah daerah pada umumnya berfikir bahwa perubahan tersebut bersifat meningkatkan kualitas dari kinerja yang ada saat ini, sehingga perubahan tersebut diterima dengan positif.

Perubahan budaya dengan penyesuaian pada peraturan lokal seperti sistem dan prosedur memang lebih mudah dan cepat dilakukan daripada mengubah paradigma berpikir. Mengubah paradigma daerah termasuk pemerintah Kota Makassar yang telah terbiasa dengan peraturan lama ke peraturan baru bukanlah hal yang mudah. Hal ini juga diakui oleh Malik selaku kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar. Menurut beliau, hal yang paling sulit adalah mengubah paradigma masa lalu. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya terpaku pada apa yang dikerjakannya saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar

memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan kebijakan. Sepatutnya aparatur pemerintah Kota Makassar dalam menyikapi perubahan kebijakan yang baru adalah dengan menanamkan pikiran bahwa peraturan yang baru tersebut hadir dalam rangka peningkatan kualitas kinerja daerah, khususnya untuk pemerintah Kota Makassar. Pemahaman akan konsep-konsep baru khususnya mengenai perubahan peraturan pemerintah merupakan hal yang utama. Kelatahan akan sikap dalam menerima setiap perubahan itu sebaiknya tidak ditampilkan, namun harus dibarengi dengan pemahaman teori maupun konsep akan perubahan peraturan pemerintah tersebut.

Sikap yang terlihat dalam perubahan peraturan atau kebijakan pada pemerintahan dapat digunakan untuk mendeteksi kecenderungan seseorang. Individu dapat memiliki sikap positif atau negatif terhadap suatu perubahan budaya. Sikap positif yang ditunjukkan pada perubahan peraturan pemerintah yang baru terlihat apabila aparatur pemerintah daerah mengembangkan potensi kepemimpinan dan membangun budaya organisasi. Sebaliknya, sikap negatif terhadap perubahan peraturan pemerintah yang baru dilatarbelakangi oleh aparatur pemerintah daerah yang kurang memiliki kemauan untuk mengembangkan dirinya demi mendukung kemajuan organisasi itu sendiri. Bagi individu yang memiliki sumber daya manusia berkualitas maka akan menyambut perubahan peraturan pemerintah dengan semangat baru dan optimisme. Perubahan peraturan pemerintah ataupun perubahan kebijakan akan memberi kesempatan pada individu untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan potensi, dan tantangan untuk memajukan daerah.

Menurut Robbins (2001), sumber penolakan atas perubahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual dan

yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional. Sikap resistensi yang dilakukan oleh individu adalah: pertama, kebiasaan yaitu pola tingkah laku yang ditampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup individu tersebut. Hal tersebut dilakukan karena adanya perasaan nyaman dan menyenangkan. Jika suatu perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan individu tertentu, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Kedua, rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan individu tertentu memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun akan besar. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Keempat, yaitu takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu, muncul ketidakpastian dan keragu-raguan. Kalau kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka individu akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Dan yang terakhir yaitu persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini akan mempengaruhi sikap.

Perilaku resisten berupa keengganan para aparatur terhadap perubahan kebijakan tidak mustahil juga ditemukan di lapangan. Hal ini tergambar dari komentar salah satu informan saat ditanyakan tentang kasus peralihan standar akuntansi pemerintahan menjadi basis akrual yang mengacu kepada peraturan pemerintah baru. Yuni seorang pegawai bagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar mengemukakan:

Proses menyusun laporan keuangan yang berbasis kas menuju akrual saja masih mau di pelajari. Artinya, PP 24 yang itu saja masih mau dipelajari. Bagaimana dengan pp 71?. Jadi yang sekarang saja masih membingungkan, apalagi dengan terus berubahnya kebijakan lagi, bikin tambah pusing biasa dek.

Malik seorang kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar memberikan penjelasan tidak jauh berbeda, yang juga menunjukkan resistensi. Beliau mengatakan:

Untuk penerapan ke peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebenarnya saya belum mau ikut. Artinya, saya juga belum terlalu pahami itu. Pemahaman saya untuk saat ini hanya sebatas dasarnya saja aktual itu. Tapi karena sudah tugas dan menjadi peraturan pemerintah jadi harus dilaksanakan saja.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa resistensi terhadap kebijakan yang baru memang ada, selain karena aturan lama yang masih butuh pembelajaran dan sering terjadinya perubahan kebijakan juga mendorong perilaku ini. Resistensi tersebut muncul karena adanya kebiasaan yang berubah, yaitu mereka mengubah cara kerja dengan pola yang lama mengikuti ke pola yang baru. Masalah utama dalam hal ini ialah pola lama tersebut masih mengalami kendala tertentu dan membutuhkan pembelajaran akan konsep tersebut secara mendalam.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Malik selaku kepala subbagian verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar, yang menuturkan pernyataan sebagai berikut:

Pada umumnya kita pasti akan menjalankan perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Masalah yang terkadang dihadapi adalah apakah kita mampu untuk menerapkan peraturan pemerintah yang baru tersebut. Seperti contohnya pada PP 71 ini, bagi daerah memang asing. Artinya, produk baru jadi kita masih tanda tanya sebenarnya bisa tidak buat seperti ini.

Dari ungkapan informan di atas, terlihat jelas bahwa mereka memandang perubahan tentunya tidak mudah untuk diprediksi hasilnya di masa yang akan datang. Respon tersebut sangat erat dengan sikap penolakan yang ditunjukkan oleh Robbins (2001) yang menyatakan bahwa dalam posisi saat ini, secara nyata beliau takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Hal ini terutama didukung dengan

alasan bahwa peraturan pemerintah atau kebijakan yang baru dipandang sebagai barang baru yang pengimplementasiannya memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal ini mereka ragu-ragu akan keberhasilan dari penerapan peraturan pemerintah terbaru tersebut. Ketika kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nantinya setelah perubahan belum pasti, maka pemerintah Kota Makassar akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan.

Keragu-raguan timbul dikarenakan untuk menuju ke suatu perubahan diperlukan pemahaman yang mendalam dan luas terhadap konsep-konsep yang akan diterapkan nantinya. Namun, realitanya sebagian sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Makassar masih terbatas. Utamanya untuk SKPD-SKPD kecil seperti SKPD kecamatan yang ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Iswady, seorang kepala subbagian keuangan dinas pendapatan daerah Kota Makassar, ia agak pesimis dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010:

yang pasti pemahaman kita terkait dengan suatu perubahan misalnya PP 71, untuk basis akrual masih kurang apalagi kalau kita berbicara dalam tataran implementasi nanti ke depan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Malik selaku kepala subbagian

verifikasi dan akuntansi bagian keuangan sekretariat Kota Makassar yang mengatakan:

Untuk perubahan kita selalu terbuka, rata-rata SKPD Kota Makassar pun begitu. Cuma memang untuk SKPD kecil seperti SKPD kecamatan terkadang masih kesulitan untuk menerima perubahan baru, karena terkadang mereka yang ke sini untuk diajarkan buat seperti ini. Begitu dek tapi pastilah kita semua terbuka untuk perubahan yang baik.

Dari wacana-wacana di atas, maka aparatur pemerintah Kota Makassar secara individual bertindak sesuai dengan nilai kepribadian mereka masing-masing. Nilai kepribadian ini merupakan nilai yang dapat membentuk kepribadian

seseorang, seperti emosi, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Jadi, aparat pemerintah Kota Makassar secara individu ada yang memberikan respon negatif terhadap perubahan peraturan pemerintah ataupun perubahan kebijakan dengan memandang bahwa aturan baru akan lebih rumit dan tidak sesuai dengan kompetensi SDM dan sering terjadinya perubahan kebijakan yang akan mendorong perilaku resistensi. Secara individual, pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar memberikan respon negatif terhadap kebijakan pemerintah karena aparat cenderung terpaksa untuk mengikuti peraturan pemerintah tersebut. Namun, ada pula yang memberikan respon positif terhadap perubahan peraturan pemerintah ataupun perubahan kebijakan dengan memandang bahwa perubahan yang diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah tersebut merupakan keputusan yang tepat dan terbaik untuk kemajuan daerah.

BAB VI

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Signifikansi peran pemerintahan, dalam hal ini sektor publik, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menimbulkan berbagai reaksi secara individual oleh aparat pemerintah Kota Makassar, baik reaksi positif maupun negatif. Namun, secara budaya organisasi menganut tipe *bureaucratic culture*, di mana prosedur yang kaku dalam menjalankan aktivitas

organisasinya maka pemerintah Kota Makassar diwajibkan mengikuti segala ketentuan dan aturan main dalam budaya organisasi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar memiliki kewajiban dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Pemerintah Kota Makassar melakukan persiapan-persiapan dalam menuju implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Hal ini didukung dengan adanya bukti nyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kota Makassar dengan melakukan persiapan menuju ke implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah merupakan perilaku yang berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang mewajibkan kepada semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk persiapan pemerintah Kota Makassar seperti sosialisasi kepada aparat pemerintah Kota Makassar, merevisi peraturan pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual di tahun 2015 nanti.

4.2. Saran

Saran atau rekomendasi yang diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini, dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual di tahun 2015, khususnya pada pemerintah Kota Makassar yaitu perlu adanya upaya akselerasi sinkronisasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan peraturan lokal di pemerintah daerah. Pemerintah Kota Makassar sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang nantinya akan diterapkan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan demikian, tidak timbul masalah saat penerapan. Selain itu, juga diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan *training* atau pelatihan berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut.

4.3. Keterbatasan Penelitian

Kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan sebagian dari aparat pemerintah Kota Makassar belum dapat memberikan penjelasan yang akurat dan masih terbatas pada standar akuntansi pemerintahan kas menuju akrual karena perubahan menuju ke standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih belum dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliana, Gaybi. 2011. *Implementasi Basis Akrua Pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cameron Kim. S, Robert E.Quinn. (1999). *Diagnosing and changing Organizational Culture*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. USA.
- Damanik, Citra. 2011. *Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Erna MS. 2008. *Pendekatan Interpretif*. <http://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/>. Diakses tanggal 28 September 2012.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses tanggal 12 September 2012.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 April 2012.
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrua Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari.

Luthans, F. 1998. *Organizational Behaviour*. 8th edition. Singapura: McGraw-Hill

Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.

Mangundjaya, Wustari H. 2002. *Mempersiapkan Individu Di Organisasi Untuk Menghadapi Perubahan*. <http://apioindonesia.files.wordpress.com/>. Diakses tanggal 28 September 2012.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrua di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD*. (<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akrua.pdf>). Diakses tanggal 9 April 2012.

Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Robbins, S. P. 2001. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, Application*. Edisi 8: Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik*. (www.iaiglobal.or.id/tentang_iai_download.php?id=66&kfile=1). Diakses tanggal 9 April 2012.

Shohib, Muhammad. 2010. *Strategi Perubahan Budaya Organisasi*. <http://ms.shohib.staff.umm.ac.id/>. Diakses tanggal 17 September 2012.

Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.

Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan*. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>. Diakses tanggal 9 April 2012.

Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sobirin, Ahmad. 2005. Privatisasi: Implikasinya terhadap Perubahan Perilaku Karyawan dan Budaya Organisasi. *Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis on Human Resources*, 19-42.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulani, Aldiani. 2010. *Faktor–Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Widjajarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*. <http://Sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akrual-pdf>. Diakses tanggal 9 April 2012.

Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323

www.medinamultimitra.com. Diakses 17 September 2012.

www.wikiapbn.com. Diakses tanggal 25 April 2012.

Yuwono, C, D, Ino dan Putra Bagus Ani. 2005. *Faktor Emosi Dalam Proses Perubahan Organisasi*. INSAN Vol. 7 No. 3. 250-263

LAMPIRAN

MANUSKRIP

Responden : Ahdi Abidin Malik
Waktu wawancara : 28 November 2012 (10.00-10.30)

Peneliti : Saya dari mahasiswi jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis pak ingin meneliti tentang analisis kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Responden : Oh iyah, silakan dek.

peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan apakah bapak dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 ini?

Responden : Jadi, kita dari tahun 2010 sudah terima di internet baik juga dari Depdagri tentang PP 71 ini yang inti di dalamnya itu akuntansi berbasis akrual. Di 2011 kita sudah sosialisasikan kepada semua SKPD. Jadi artinya di tahun 2013 nanti kita sudah ada kegiatan untuk persiapan menuju ke PP 71.

Peneliti : Untuk awalnya pak, bisa bapak jelaskan mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual itu seperti apa?

Responden : Menurut pendapat kami yang khusus di keuangan kota makassar bahwa akuntansi akrual itu, semua transaksi yang telah terjadi kita sudah akui sebagai belanja dalam PP 71. Namun di SAP 24/2005 bahwa semua transaksi itu nanti setelah ada pertanggungjawabannya baru kita akui sebagai belanja.

Peneliti : Jadi Contoh transaksinya pak seperti apa?

Responden : Contoh transaksinya itu di PP24/2005 kalau kas keluar SP2D di SKPD itu, PPKD SKPD itu nanti diakui sebagai belanja setelah muncul SPM masuk di keuangan diakui BUD sebagai belanja setelah muncul SP2D, bagi BUD diakui belanja setelah muncul SP2D itu surat pencairan dana. Tapi kami di bidang akuntansi nanti kami akui belanja ini setelah ada pertanggungjawaban SPJ nya. Tetapi dengan munculnya PP 71/2010, bahwa pada saat penganggaran, itu saat dianggarkan saja transaksi itu sudah dianggap belanja.

Peneliti :Jadi sudah diakui pak?

responden :Sudah diakui sebagai belanja. Dan selama ini di PP 24,laporan keuangan kota makassar itu kita masih modifikasi artinya khusus untuk asset kita sudah akrual tapi untuk cash flow kita masih cash basis.

peneliti :Kemudian bagaimana disini pak mengenai pemahaman dan persepsinya bapak terhadap laporan keuangan dengan konsep akrualnya? Laporan keuangan yang dihasilkan pak kan berbeda nantinya ini.

Responden :Sudah beberapa pelatihan yang saya ikuti memang untuk akrual itu sangat rumit. Kita buat dua laporan keuangan. Di PP 24/2005 itu artinya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, LRA, catatan atas laporan keuangan, dan cash flow. Tetapi di PP 71 ini ada tambahan 3 item lagi yang kita harus buat, jadi saya rasa untuk PP 71 ini akan lebih sulit lagi istilahnya bantu pemerintah untuk urusi daerah itu lebih rumit. Harus ada memang orang yang berkompetensi yang bisa membimbing daerah itu. kalau kita mungkin di Makassar istilahnya kota besar yaitu kota metropolitan jadi kita tidak terlalu sulit untuk SDM karena kita ada unhas yang bisa dampingi kita yang istilahnya kita hanya serumah jadi kita enak konsultasinya untuk penerapan ini.

Peneliti :Kemudian terkait mengenai kesiapannya apa sudah ada perda nya pak?

Responden :Kalau perda PP 71 kita belum. Kedua untuk sosialisasi kita sudah adakan dan untuk perda ini, kan kami di makassar ada pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah nomor 4 tahun 2009 kemudian ada sisdur pengelolaan keuangan daerah dan kami ada kebijakan akuntansi

pemerintah kota makassar nomor 69 tahun 2009. Tetapi ini kebijakan akuntansi kita berdasarkan PP 24/2005.

Peneliti :Jadi belum terkait dengan PP 71 Tahun 2010 pak?

Responden :Belum menyerempet sama sekali, belum menyinggung PP 71. 2013 ini kami pemerintah kota akan revisi kebijakan akuntansi untuk menuju akrual.

Peneliti :Jadi perda, perkepda, sisdur dan kebijakan akuntansinya belum ada pak?

Responden :Belum ada untuk PP 71 masih PP 24/2005.

Peneliti :Kenapa belum ada pak, maksudnya apa kendala dari pembuatan peraturannya itu?

Responden :Saya rasa kendala tidak kami temukan cuma waktu saja. Artinya begini kendala sih ada khususnya SDM yang ada di pemerintah kota makassar ini masih terbatas, terbatas dalam artian yang kami kenal di pemerintah kota Makassar cuma yang daerah kita pakai yaitu PP 24. Jadi, dibilang apa kendalanya mungkin kendalanya PP 71 ini bagi daerah memang asing, artinya produk baru, jadi kita masih tanda tanya bisa nggak buat seperti ini. Tapi kalau kami lihat makassar pasti ikut dan saya lihat provinsi juga kemarin mulai jalan, kami juga pemerintah kota makassar di tahun 2013 kami revisi dulu perwalinya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan serta sistem kebijakan akuntansinya, artinya di 2013 kami akan revisi untuk persiapan menghadapi PP 71 di 2015 nanti .

Peneliti :Software untuk mendukung laporan keuangan ini pak?

Responden :Software untuk mendukung laporan keuangan ini sudah ada untuk PP 24 tapi PP 71 kami juga belum.

Peneliti :kemudian untuk sosialisasinya pak sudah berapa kali diadakan?

Responden :Sudah 2 kali. 2010 sudah sosialisasi, 2011 juga sudah. Bahkan SKPD kami sudah workshop, adakan workshop pada tingkat SKPD.

Peneliti :Apakah ada alokasi SDM yang dipersiapkan untuk menangani ini bagaimana masalah pengalihannya ini?

Responden :Oh belum. Kami di bagian keuangan yang masih fokus memikirkan itu. Tapi pelaksanaan di 2013 masih revisi untuk perwalinya. InsyaAllah 2015 kami akrual.

Peneliti :Kemudian pak masalah komitmen dari pimpinan pak apakah didukung dengan baik?

Responden :Kalau komitmen pimpinan sangat mendukung. Artinya pimpinan di pemerintah kota itu apapun peraturan dari pemerintah pusat yang sifatnya bisa membantu pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan atau untuk membuat anggaran, komitmen pemerintah kota sangat antusias untuk itu.

Peneliti :Kemudian ini menyangkut mengenai anggaran, apakah ada kaitannya antara LKPD yang berbasis akrual dengan anggaran yang ada di APBD yang berbasis kas. Jadi apakah APBD nya juga ini harus berbasis akrual. Karena kan sekarang APBD nya berbasis kas pak.

Responden :Iyah berbasis kas. kalau di PP 71 harus. Karena di PP 71 saya lihat sudah dianggarkan itu akan akrual. Sudah diakui sebagai pendapatan umpamanya dianggarkan 5M maka itu sudah dicatat bahwa sebegitu pendapatan yang akan dicapai.

Peneliti :Jadi kelebihan apa yang dapat diperoleh nanti pak, misalkan ketika kita menerapkan laporan keuangan berbasis akrual ini?

Responden :Kalau saya sebagai bidang akuntansi saya kemarin pernah ikut di jogja bersama diundang sama mendagri masalah akrual ini ada salah satu top akuntansi yang dari UGM itu dia S3 nya dari Amerika dia sempat katakan accrual, apakah accrual ini bisa dipertanggungjawabkan katanya di depan Allah SWT. Ini sudah S3 dari akuntansi Amerika belum berani menerapkan akrual di Indonesia saking beratnya dan tanggung jawabnya katanya. Tapi yah namanya institusi yah semua daerah harus ikut dalam

hal itu. Cepat atau lambat pasti kita ikut, cuma yah batas penerapannya paling lambat 2015 dan sudah seragam semua.

Peneliti :Jadi strategi penerapannya ini kota makassar mulai dari tahun 2013 pak baru mulai pelaksanaannya?

Responden :Iyah perdanya. InsyaAllah 2015 kita sudah akrual

Peneliti :Kemudian pak disini jadi faktor-faktor kendalanya sehingga belum diterapkannya ini PP 71

Responden :SDM .

Peneliti :Cuman fokusnya memang ke SDM pak?

Responden :Saya rasa SDM

Peneliti :Kalau dari infrastrukturnya pak?

Responden :Kalau infrastruktur itu saya rasa tidak yah.

Peneliti :Jadi memang fokusnya itu memang hanya SDM yah pak?

Responden :Iya.

Peneliti :Kemudian kalau SDM itu pak maksudnya bagaimana? Kenapa bisa menjadi kendala utama pak?

Responden :Karena pada saat akrual. Karena rata-rata di SKPD atau PPKSKPD belum mengerti apa itu akrual. Yang dia kenal hanya PP 24 standar akuntansi pemerintahannya. Kalau kami di akuntansi keuangan menghasilkan 4 laporan keuangan, setelah akrual sudah berjalan saya lihat ada 8 atau 7 laporan keuangan. Sebagian kecil SKPD di Makassar yang tidak punya konsultan untuk PP 24 masih kesulitan begitupun untuk sebagian kecil SKPD kecamatan. Itu saja kalau laporan keuangan, kami bagian keuangan yang membantu buat. Panggil ke sini buat neraca ini.

Peneliti :Secara pribadi pak bagaimana responnya bapak sebagai individual terhadap keputusan pemerintah mengenai kewajiban dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini

Responden :Disatu sisi sebagai pribadi, saya terus terang lebih suka PP 24 cuma di sisi lain PP 71 istilahnya pada saat penganggaran itu sudah tertulis sebagai belanja sementara di PP 24 itu setelah terjadi pembayaran baru artinya pp 24 itu baru ppskpd itu setelah masuk BUD, BUD nanti akui sebagai belanja setelah muncul SP2D nanti di bidang akuntansi kami itu mengakui sebagai belanja ketika ada masuk pertanggungjawaban. Jadi saya komen untuk PP 71, belum saya mau ikut artinya saya juga belum terlalu pahami, artinya SAP yang biasa kita pakai saja terlambat penyusunan laporan keuangannya apalagi setelah akrual lebih banyak lagi laporan yang kita buat itu kendalanya. Jadi saya pribadi sebetulnya ada sih juga khususnya ada indikasi lah penyalahgunaan wewenang, jadi akrual ini cepat dilacak karena kapan dia ini sudah diakui tidak bisa dirubah lagi. Sedangkan di PP 24 itu fleksibel.

Peneliti :Dan secara organisasinya pak ini harus dilaksanakan pak?

Responden :Harus. Mau tidak mau harus, jadi harus yah walau saya juga belum terlalu memperdalam juga ini PP 71 saya lebih suka PP 24 tapi mau tidak mau sebagai institusi atau lembaga kita harus ikuti apa yang diperintahkan oleh departemen dalam negeri karena kita kan selaku pemerintah daerah.

Peneliti :kalau begitu, makasih banyak pak atas waktunya.

Responden :Iyah sama-sama.

MANUSKRIP

Responden : Yuni
Waktu wawancara : 28 November 2012 (10.45-11.07)

Peneliti : Jadi yang pertama ingin saya tanyakan disini apakah kak Yuni sudah mengetahui tentang PP 71 tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

Responden : Iyah.

Peneliti : Jadi bagaimana pemahamannya kak Yuni sendir mengenai PP 71 ini?

Responden : Begini, kan kita baru tau ini dari pelatihan-pelatihan kan, ini kan belum berlaku . PP 71 kan penggantinya PP 24 dan belum berlaku. Terus bedanya itu kalau PP 24 itu, saya cuma tau dari bedanya saja dan disitu saya tahu ini nya, kalau PP 24 itu lebih sederhana dari pada PP 71. PP 71 itu kayak apa yah. Kalau di kuliah kan dulu PP 24 itu ada kan akuntansi pemerintahan nah dia sama seperti itu. Terus kalau PP 71 dia kayak akuntansi perusahaan dagang begitu. Lapornya akan lebih banyak. Ada pakai beban sementara kalau PP 24 yang dipakai sekarang cuma pakai biaya atau belanja, pendapatannya juga ada dua kalau tidak salah yah.

Peneliti : Jadi kalau di PP 24 itu menggunakan korolari mbak?

Responden : Iyahh kalau 24 memakai korolari kalo 71 dia sepertinya sudah tidak pakai karena dia langsung. Kalau 71 lebih banyak laporannya, ada beberapa itu laporannya, pokoknya lebih banyak dari PP 24

Peneliti : Jadi kita ini cuma melihat tingkat kesulitannya dari segi banyaknya laporannya ataukah ada tambahan lain?

Responden :Iyah kalau menurut saya lebih ribet memang pakai PP 71 karena bukan cuma laporannya tapi karena analisisnya juga beda, kalau pendapatan itu jurnalnya dia cuma pakai single saja tapi kalau 71 banyak buku besarnya begitu kayak perusahaan dagang

Peneliti : Kemudian apakah ada kaitan antara LKPD berbasis akrual dengan anggaran yang berbasis kas. Apakah APBD ini juga harus mengikuti LKPD yang berbasis akrual?

Responden : Kalau sekarang kas menuju akrual kalau 71 kayaknya dia harus akrual saja. jadi yah APBD nya juga harus akrual karena laporannya kan dua macam mungkin jadinya nanti.

Peneliti : Kemudian apakah kak Yuni sudah pernah ikut sosialisasi ?

Responden : Iyah

Peneliti : Sudah berapa kali?

Responden : 2 kali kayaknya tapi cuma pengenalan, sekedar pengenalan

Peneliti : Jadi penjelasannya hanya seperti apa itu PP 71

Responden : Iyahh, bagaimana bedanya, bagaimana laporannya,

Peneliti : Jadi setelah mengikuti sosialisasinya itu bagaimana tanggapannya kak Yuni tentang PP 71 ini?

Responden : Iyah bagus, cuman kayaknya tidak siap juga yang bikin PP 71 karena masih rancu menurut saya.

Peneliti : Jadi bagaimana respon anda sebagai individual terhadap keputusannya ini kewajiban penerapan PP 71?

Responden : Kalau saya sih lebih suka PP yang lama saja karena pp 71 itu lebih apa yah dek? pokoknya sekarang saja PP 24 masih mau dipelajari.

Peneliti :Jadi dari kerumitannya kita lihat yah?

Responden :Iyah. Tapi bagus kalau pakai PP 71, jadi APBD nya itu lebih di apa di' lebih bisa dipertanggungjawabkan menurutku.

Peneliti : Maksudnya lebih dipertanggungjawabkan apanya?

Responden : Maksudku lebih bisa digambarkan mungkin. Lebih bisa dipertanggungjawabkan begitu. Lebih tercatat ki. Kalau PP 71 lebih bagus laporannya.

Peneliti : Kemudian untuk alokasi persiapan SDM nya bagaimana? Apakah ada dipersiapkan untuk mangalokasi nanti ini masalah peralihannya?

Responden : Belum ada kayaknya

Peneliti : Kalau perdanya, SOPnya, dan kebijakan akuntansinya bagaimana kak?

Responden : Belum juga. Karena kebijakan akuntansi juga yang ada sekarang baru tahun 2009 kemarin ada.

Peneliti : Kenapa kak belum ada, maksudnya alasan sehingga belum adanya perda yang terkait?

Responden : Ndak tau juga, dari pimpinan juga mungkin yang bagaimana. Yang jelas selalu ada sosialisasi yang selalu diikuti. Terus kita juga sudah pernah ada sosialisasi untuk semua SKPD disini. Tapi hanya sekedar pengenalan bagusnya ada prakteknya begitu.

Peneliti : Terima kasih banyak kak atas waktunya.

Responden : Iyah sama-sama dek.

MANUSKRIP

Responden : Iswady
Waktu wawancara : 10 Desember 2012 (11.05-11.32)

- Peneliti : Jadi yang pertama ingin saya ketahui disini pak mengenai pemahaman bapak terkait dengan PP 71 tentang akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual seperti apa?
- Responden : Iyah, pemahaman di tingkat SKPD karena dinas pendapatan ini SKPD. Sementara di tingkat pemerintah kota dalam hal ini bagian keuangan selaku SKPKD harusnya bagian keuangan dalam artian pemerintah kota memfasilitasi kita semua. Saya tidak tau, kalau tidak salah sudah pernah kita adakan sosialisasi satu kali cuma kita yang pasti pemahaman kita terkait dengan PP 71 itu untuk basis akrual masih kurang apalagi kalau kita berbicara dalam tataran implementasi nanti ke depan. Tetapi yang pasti persiapan-persiapannya mengarah ke sana sementara kita lakukan. Dan tentunya dalam hal ini harusnya kita tidak berdiri sendiri. Penerapan aturan itu kan bukan hanya dispenda saja tetapi harus semua SKPD dalam hal ini tentunya pemerintah kota dalam hal ini bagian keuangan harusnya lebih intens melakukan workshoplah atau pelatihanlah atau apalah sosialisasi kepada kita terkait dengan implementasi itu minimal saya tidak tau langkah-langkah persiapan di pemerintah kota dalam hal ini bagian keuangan apakah sudah ada drafnya, dia akan merevisi tentang peraturan walikota kita. Sebelumnya itu sudah ada perda kita tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah terus ada peraturan walikota tentang sistem dan prosedur dimana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terus ada peraturan walikota nomor 69 tahun berapa saya lupa tahun berapa tentang standar akuntansi pemerintah untuk lingkup kota makassar, didalamnya itu mengatur bahwa basis kita adalah kas modifikasi. Kalau memang mau berubah mengikuti PP kita siapkan dulu draf nya itu sebagai instrumen dasar hukum untuk pelaksanaannya, akan merevisi tentang peraturan walikota kita.
- Peneliti : Jadi sampai sekarang pak belum ada perda yang terkait mengenai pengalihan standar ini?
- Responden : saya tidak bisa jawab itu dek, harusnya kita tanyakan pada pak ahdi karena dia kan di tingkat kota. Nah kalo saya di dispenda.
- Peneliti : Jadi terkait juga mengenai SOP, kebijakan akuntansi semuanya itu pak diatur di kota?
- Responden : Iyah harusnya itu kan mereka atur dulu di tingkat pemerintah kota. Saya tidak tau bagaimana progressnya bagaimana perkembangannya yang pasti yang lebih tahu itu adalah pak ahdi subbagian akuntansi.
- Peneliti : Jadi kita menunggu dari kota ini pak?
- Responden : Iyah menunggu sambil kita juga belajar, kita juga mempersiapkan langkah-langkah, PP nya ini kita sudah pegang, sisa bagaimana teknis pelaksanaannya, itu pasti tentunya harus seragam dan itu ditentukan oleh bagian keuangan selaku SKPKD.
- Peneliti : Jadi pengertian kita mengenai akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual bisa dijelaskan lebih rinci pak?
- Responden : Iyah, jadi pemahaman kita masih sebatas kita sudah pernah baca yang basisnya akrual artinya yah kalau kita di dispenda mengelola pendapatan dengan belanja berarti pendapatan itu diakui yang ada di pemahaman kita untuk sementara ini pada saat skpd (surat ketetapan pajak daerah) terbit artinya kapan diakui itu sebagai pendapatan pada saat sudah ada ikatan meskipun belum ada uang transfer ke kasda. Meskipun belum ada uang masuk ke kasda tapi sudah ada yang mengikat antara wajib pajak dan petugas pajak pada saat itu bisa diakui sebagai pendapatan karena

basisnya adalah akrual. Kalau basisnya kas itu jika uang masuk baru kita akui. Demikian juga kalo di sisi belanja itu biar belum keluar uang tetapi sudah ada kontrak dengan pihak ketiga, kita sudah bisa akui sebagai pengeluaran atau belanja. Itu pemahaman awal kita karena kita teori awalnya kan akrual. Baru sebatas itulah.

Peneliti : Bagaimana pemahaman dan persepsinya bapak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan dengan konsep akrual ini pak? Kan laporan keuangan yang dihasilkan pasti berbeda.

Responden : Persoalannya karena kami belum pernah membuat laporan keuangan baru yang berbasis akrual. Jadi *learning by doing* sebenarnya. Pada saat itu diterapkan kita mau lihat dulu sebenarnya bagaimana nanti peraturan walikotanya terkait dengan PP 71 seperti apa bentuknya, bagaimana mekanismenya baru kita bisa menyusun laporan keuangan berarti kalo penerapannya itu di tahun 2014 berarti laporan keuangan 2014 di tahun 2015. Pasti kan seperti itu, kan laporan anggaran di tahun 2014 disusun di januari 2015. Yah Seperti itu.

Peneliti : Apakah SDM nya disini sudah pernah diikutkan pelatihan mengenai PP 71 ini pak?

Responden : Kayaknya sudah pernah ada yang ikut sosialisasi. Kita sudah pernah bagian keuangan, pada saat keluarnya itu PP 71 yah. Cuma saya tidak tahu apakah bagian hukum yang adakan atau bagian keuangan langsung saya lupa. Tetapi yang pasti bahwa pesertanya sudah dari dispenda ada.

Peneliti : Sudah berapa kali pak sosialisasi diadakan?

Responden : Saya sudah lupa, mungkin cuman satu kali saja

Peneliti : Kemudian pak peserta yang diikutkan itu hanya itu-itu saja atau bergilir?

Responden : Karena pelaksanaannya satu kali jadi yah pasti untuk saat itu saja.

Peneliti : Tapi hanya sebagian orang dalam bagian keuangan yang diikutsertakan pak?

Responden : Yang pasti bahwa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti itu yang paham tentang masalah akuntansi kan. Jadi percuma juga kita usul peserta baru backgroundnya misalnya fakultas sastra. Dan kita punya staff untuk itu sehingga itu yang kita utus.

Peneliti : Kemudian disini kan penerapan SAP berbasis akrual apakah telah mendapatkan komitmen yang full dari pimpinan atau hanya sekedar wacana saja pak?

Responden : Kalau basis akrual kalau sekarang belum dek nanti kita bicarakan itu nanti. Kita kan bicara nanti ini, tapi nanti itu yang pasti bahwa semua sistem akuntansi yang akan dilakukan harusnya berdasarkan ada landasan hukumnya yaitu peraturan walikota. Paling tidak dia revisi itu peraturan walikota yang kemarin. Karena basis akuntansi kita di peraturan walikota yang sebelumnya masih kas modifikasian yaitu basis kas dengan akrual di mana pendapatan dan belanja basisnya kas sementara untuk penyusunan neraca akrual. Seperti itu.

Peneliti : Jadi strategi penerapannya ini pak tunggu dari kota pak?

Responden : Iyah, karena begini dek, dispenda itu saya dek jadi saya posisiku tidak di SKPKD tetapi saya di SKPD. Sementara yang merancang regulasi itu di posisi pak ahdi

Peneliti : Kemudian kendala yang dirasakan hingga saat ini belum mampu untuk menerapkan basis akrual?

Responden : Kendalanya yah, karena persoalannya sekarang belum diimplementasikan jadi yang pasti kendalanya pemahaman yah. Berbicara nanti kedepannya yang bisa kita prediksi yang pertama pemahaman. Jadi harus satu persepsi dulu Pemahamannya apa itu akrual. Nah itu sebenarnya gunanya kita menyusun peraturan walikotanya supaya itu yang bisa dijadikan acuan. Ada kan juga peraturan walikota nya kita harus tafsirkan itu jadi kita harus penafsiran

terkait dengan peraturan walikota itu. Nah persoalannya kemudian peraturan walikota itu saya tidak tau progressnya bagaimana di pak ahdi, apakah mereka sudah siapkan sebagai langkah antisipasi tetapi yang pasti sesuatu yang beralih pasti itu butuh waktu untuk penyesuaian dan pemahaman. Sama dengan pada saat kita mau beralih dari kepmendagri 2002 toh tentang pedoman pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi permendagri 13 tahun 2006. Kan berubah itu dari kode rekening belanja publik aparatur kan sekarang menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung kan. Tidak semua orang paham itu, dan pasti kalau pas berubah begitu kan pasti ada proses konversi laporan keuangan dari model kepmendagri 2002 ke model permendagri 13 biasa ada begitu dek ada juknisnya.

Peneliti : Kemudian pak pertanyaan terakhir bagaimana responnya bapak sebagai individu mengenai keputusan pemerintah dalam mengubah standar akuntansi pemerintahan menjadi PP 71?

Responden : Yahh, kalo kita di tingkat SKPD kan kita sebenarnya posisinya menerima apapun itu yang menjadi aturan. Karena kalau sudah menjadi aturan kita harus ikuti sisa bagaimana kita menambah wawasan menambah kualitas kita untuk bisa memahami aturan tersebut. Persoalan mau akrual mau basis kas menuju akrual persoalan metode saja. tetapi yang pasti katanya kita lebih repot kalau akrual katanya ketimbang basisnya kas. Tapi nanti kita lihat bagaimana penerapannya nanti.

Peneliti : Jadi bapak belum bisa pak meresponnya bagaimana ?

Responden : Iyah belum bisa dek. Karena bagaimana bisa kita memberikan penjelasan sementara kita belum laksanakan belum kita lalui tapi yang pasti kita sudah prediksi ini ini kira-kira kendalanya.

Peneliti : Iyah makasih banyak pak

Responden : Iyah sama-sama.

MANUSKRIP

Responden : Syafril Anshary
Waktu wawancara : 13 Desember 2012 (10.55-11.25)

Peneliti : Pertama yang ingin saya tanyakan pak adalah basis akuntansi apa yang digunakan saat ini dalam penyusunan laporan keuangannya?

Responden : Untuk saat ini masih menggunakan PP 24.

Peneliti : Kemudian apakah bapak disini dan para pegawainya rata-rata sudah mengetahui tentang adanya PP 71

Responden : iyah sudah.

Peneliti : mulai dari dikeluarkannya ataukah ketika disosialisasikan pak?

Responden : secara umum teman-teman begitu.

Peneliti : iyah pak?

Responden : Secara umum pas sosialisasi sebenarnya kita tahu ada PP 71 ini.

Peneliti : kemudian bagaimana pemahamannya bapak terkait dengan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, apa itu akuntansi pemerintahan berbasis akrual?.

Responden : kalau yang saya pahami, kalau PP 24 ini peralihan atau perubahan dari PP 24 tahun 2005 dari basis kas menuju akrual jadi sekarang dengan dikeluarkannya PP 71 tahun 2010 ini yang setahu saya dia akan diterapkan tahun 2015, sementara ini kita masih menerapkan PP 24 tahun 2005 sampai karena ini kan nanti juga ada dari pemerintah kota yang mengeluarkan kebijakan.

Peneliti :kemudian contoh transaksinya pak kalo di dinas kesehatan sendiri seperti apa yang akrualnya

Responden : kalau akrual misalnya kalau penerimaan. Di bendahara penerimaan itu, kan ada juga bendahara pengeluaran. Kalau bendahara penerimaan itu, kalau kas itu kalau masih PP 24 ketika dia berpengaruh di kas kan berpengaruh di kas penerimaannya. Nah kalau akrual itu bukan pada saat diterimanya kas begitu dia diakui itu misalnya jadi bisa memungkinkan banyak terjadi piutang disitu.

Peneliti :Kemudian bagaimana pemahaman dan persepsinya bapak terkait lagi mengenai laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi akrual. Kan sudah bertambah, jadi bagaimana pak tanggapannya?

Responden : jadi bertambah laporannya kan, ada laporan kas, laporan operasional dan laporan ekuitas. Tentunya perlu lagi sosialisasi karena kerumitannya, juga kalau dari sisi PP 71 ini diterapkan, pasti banyak perubahan yang terjadi jadi perlu lagi sosialisasi yang lebih intensif.

Peneliti : kemudian disini bagaimana dengan perda yang terkait dengan sistem prosedurnya dan kebijakan akuntansinya pak? Apakah sudah ada?

Responden : nah itu kan kita tunggu dulu, kalau PP 71 kan turun ke permendagri.

Peneliti : jadi belum ada pak perdanya untuk saat ini yang terkait dengan PP 71

Responden :iyah belum ada peraturan dari setkonya.

Peneliti : jadi itu kita menunggu lagi dari setkonya pak?

Responden :iyah

Peneliti :kemudian apakah sisdur yang dipakai untuk saat ini, apakah sudah menunjang pelaksanaan laporan keuangannya pak?

Responden :kalau untuk PP 24 kita disini pakai aplikasi

Peneliti :kemudian kalo dari literatur dinyatakan bahwa laporan keuangan yang menggunakan basis akrual memberikan informasi yang lebih akurat dan andal jika dibandingkan dengan basis akuntansi lainnya. Bagaimana tanggapannya bapak dengan hal ini?

Responden :iyah saya kira seperti itu karena dia bukan pada saat terjadinya, pengaruh di kas tapi betul-betul dari sisi pengakuan. Akrual itu kan dari sisi pengakuan. Kapan dia diakui penerimaan dan belanja diakui. Bisa

saja kalo di akrual itu belum berpengaruh di kas tapi sudah diakui. Cuma kerumitannya itu yah dari sisi penyesuaianya nanti.

Peneliti :kemudian kan tadi belum ada peraturan-peraturannya, kendala apa yang mendasari hal ini sehingga belum ada pembuatan peraturannya pak

Responden : yah karena permendagrinya saja belum fiks kan. Jadi begitu nanti keluar permendagrinya baru disiapkan perdanya kan. Nanti juga sisdurnya termasuk juga kebijakan akuntansinya. Kan berurutan itu nanti.

Peneliti : kemudian disini apakah sudah pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai PP 71?

Responden : kalo sosialisasi di makassar itu kebetulan saya ikut juga dulu di di hotel celebes itu pemkot sudah adakan sosialisasi mengenai PP 71 berbasis akrual

Peneliti : jadi berapa kali sosialisasi yang bapak ikuti selama ini

Responden : kalo untuk tahun ini yah baru satu kali

Peneliti : kalo tahun 2011 nya pak?

Responden :kalo 2011 yah karena saya pindahan juga disini yah, saya masuk 2012 yang jelas saya ikut sosialisasi kemarin bulan juni kayaknya

Peneliti : jadi yang diikutsertakan ini hanya 2 atau 3 orang saja ataukah seluruh staf keuangan

Responden : kalo bagian kesehatan kebetulan satu orang saja. Nanti setelah itu dibagi-bagikan, diinformasikan lagi kepada yang lain.

Peneliti : tapi backgroundnya disini akuntansi semua yah pak?

Responden :oh tidak semua, yang akuntansi itu saya, bu asni sama siapa lagi itu fitri tapi dari poltek sama yusran jadi empat orang.

Peneliti : di sini kan hanya bapak yang mengikuti sosialisasi, jadi misalkan bapak dimutasi lagi terus bagaimana perkembangan selanjutnya pak mengenai PP 71 ini, apa hanya sebatas bapak yang tahu?

Responden : di sini dirolling biasanya jadi kalau ada pelatihan mengenai itu lagi yah diganti lagi orangnya

Peneliti :kemudian bagaimana menurut bapak kompetensi yang dimiliki apakah telah menunjang dalam penyusunan laporan keuangannya pak?

Responden : untuk laporan keuangan saat ini yah cukup lumayan lah

Peneliti : kan artinya pak begini kalo sekarang sudah bagus artinya kita mampu untuk beralih ke peraturan pemerintah yang baru? Tapi kalau yang sekarang bagaimana?

Responden :nanti kan ada sosialisasi. Yang jelas yang saya tahu itu sampai 2014 ini terutama untuk 2013 ini pasti banyak sosialisasi di sini, nanti kan digilir saja.

Peneliti : kemudian apakah sosialisasi yang dilakukan ini sudah membantu dalam pengetahuannya bapak terkait dengan PP 71 ini?

Responden : iyah cukup lumayan. Yang kemarin itu karena kita dikasih dasar-dasarnya dulu kemudian langsung simulasinya

Peneliti : kalo sistem akuntansi yang digunakan saat ini untuk laporan keuangan, apakah kita buat sendiri atau ada campur tangan pihak lain?

Responden : dari pemkot kan. Jadi nanti dia terhubung langsung sama bagian keuangan kan. Bukan masing-masing SKPD. Kecuali kalau disini kan kita ada puskesmas jadi kita baru-baru bikin aplikasi mengenai puskesmas. Disini membawahi 38 puskesmas jadi kita harus membina juga.

Peneliti :kemudian kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan terkait persiapan SDM nya ini menuju PP 71 bagaimana pak?

Responden : kendala persiapannya? Ke depannya? Siap ibu asni untuk akrual?

Pihak ketiga : apa? Yang berbasis akrual itu? Kita mengikut saja dari pemkot. Kebijakan pemkotnya.

Responden : iyah nanti pasti ada sosialisasinya nanti itu dek

Pihak ketiga : kita dibawah pemkot jadi kalau sistemnya pemkot begitu yah kita ikut jadi kalau tidak yah tidak. Begitu dek, tidak bisa jalan sendiri.

Peneliti : kemudian sarana dan prasarananya disini bagaimana apakah saat ini sudah mendukung penerapannya. Kalo yang PP 24 bagaimana sarananya ? komputernya? Jaringannya?

Responden :yah sudah bagus

Peneliti :jadi untuk beralih nanti pak sudah tidak dibutuhkan lagi sarana dan prasarana penunjangnya.

Responden : tinggal penerapan sosialisasi PP 71 nya lagi.

Peneliti : jadi lebih ke SDM nya saja ini pak

Responden :iyah

Peneliti :kalo mengenai buku literatur begitu apakah ada disiapkan pak?

Responden :buku literatur ada. Ada buku-bukunya disana (sambil menunjuk lemari buku).

Peneliti :jadi kalau misalnya sudah diterapkan PP 71 berbasis akrual apakah bisa meningkatkan opini dari WDP kan sekarang pak ke WTP?

Responden : karena ini kan peralihan ke peraturan baru lagi dan memang kan targetnya pemkot sekarang untuk menuju WTP

Peneliti : jadi kalau dari sistem akuntansi serta sarana dan prasarananya sudah bagus pak? Maksudnya sudah tidak masalah lagi jika ada peralihan? tinggal SDMnya saja?

Responden :iyah tinggal sosialisasi seperti itu dan aplikasinya juga pasti harus diubah.

Peneliti :jadi lebih ke sosialisasi juga pak

Responden :iyah kalo sistemnya bisa nanti disesuaikan ke PP 71.

Peneliti :kemudian bagaimana di sini budaya organisasi yang terjadi setelah diberlakukannya ini pak PP 71 maksudnya secara organisasinya bagaimana pak? Maksudnya bagaimana menerima adanya perubahan pak? Jadi bagaimna organisasi sendiri menyikapinya?

Responden :yahh tentulah kalau harus ikut aturan, cuma kita tahu sendiri kalau personilnya bagaimana.

Peneliti :jadi responnya bapak disini sebagai individu terhadap keputusan peralihan ini bagaimna?

Responden :Kalo saya setuju-setuju saja yah.

Peneliti :jadi bapak ikut alur saja begitu

Responden :iyah begitu kan ini sudah kebijakan.

Peneliti :kalau begitu makasih banyak pak

Responden : oh sudah ini yah. Okey, sama-sama.

Responden : Taslim Rasyid
Waktu wawancara : 20 Desember 2012 (10.15-11.10)

Peneliti : saya dari fakultas ekonomi dan bisnis unhas pak, ingin meneliti tentang bagaimana kesiapan pemerintah kota makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual pak.

Responden : begini dek, yang baru dilakukan pemerintah kota adalah apa namanya menyiapkan tenaga-tenaga SDM nya lah kata kasarnya. Menyiapkan SDM untuk menyusun pemberlakuan PP 71. Jadi, ehh kita sudah siapkan tenaga-tenaga yang berkualifikasi di bidang itu.

Peneliti : artinya sudah ada alokasi SDM untuk itu pak?

Responden : orangnya sudah ada dan juga dari akuntansi. Nanti kau tanya stafnya disana yang namanya fauziah.

Peneliti : oh iyah pak

Responden : kemudian untuk perangkat lainnya misalnya hardcopynya kita kan perlu baca buku dan aturannya pun sudah ada yaitu permendagri 71

Peneliti : jadi artinya permendagri di sini sudah ada pak?

Responden : iyah. Itu tadi yang kusebut kan permendagri 71. PP ada permendagri kalo ndak salah sudah ada permendagri. Yang jelas sudah ada permendagri. Saya kurang tahu kalau sudah ada bultek. Biasa baca bultek?

Peneliti : buletin teknis pak? Owh iyah pak

Responden : kau download saja dari internet ada bultek itu. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan itu dari segi SDM kemudian yang kita lakukan itu adalah cuma baru membaca-baca itu aturan.

Peneliti : artinya buku-buku literatur sudah ada pak?

Responden : berkaitan dengan itu sudah ada. PP 71 kan sudah dibagikan, sudah bisa kita download itu

Peneliti : berkaitan dengan sarana dan prasarannya bagaimana pak?

Responden : tidak ada masalah kalau itu karena memang sudah ada

Peneliti : jadi artinya sudah oke pak? Tinggal masalah SDM nya saja?

Responden : bukan juga, SDM nya juga sudah ada hanya saja ada metode nya nanti ini bagaimana pemberlakuannya itu karena sebelumnya kita mengacu ke cash basic. Kas menuju akrual itu kan sudah kita lakukan. Dan perangkatnya juga sudah ada komputernya sudah ada. Hanya saja perbedaannya kalo akrual basic kan di LRA juga harus diakrualkan kan sebelumnya di cash basic, pendapatan, belanja, pembiayaan kita cash kan, nanti di neraca kita lakukan itu akrualnya. Tapi sekarang kan seluruhnya sudah harus diakrualkan. Sederhana akrualnya kita langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui. Pada saat akhir tahun kemudian pendapatan tidak mampu dipenuhi berarti itu menjadi piutang. Begitu juga di belanja, sebenarnya itu buktinya akrual hanya saja jurnalnya yang banyak kali. Kalau tidak salah empat kali jurnal sampai dengan tahap pelaksanaannya pencairan dananya.

Peneliti : artinya sosialisasi mengenai PP 71 ini pak sudah ada?

Responden : pernah. Itu makanya nanti kau bicara sama staf ku. Saya cuma baca-baca bukunya. Karena kalau saya liat itu sebenarnya yang berbeda kan cuma persoalan jurnal pengakuan awal. Yang tadinya kita ke cash basic untuk pendapatan dan belanja dan sekarang kita akrualkan. Sederhana sebenarnya itu yang tadinya nanti kita akui setelah ada kasnya ada uangnya masuk ke kas daerah nah sekarang tidak, pada saat penetapan APBD itu sudah menjadi tercatat sebagai utang atau piutang. Itu perbedaan mendasarnya.

Peneliti : jadi artinya nanti disini lagi bertambah lagi laporan keuangannya pak

Responden : pasti karena ada jurnal kemudian di sistem itu juga harus kita berlakukan itu, di sekretariat DPRD tidak ada pendapatan.

Peneliti : kalo tanggapannya pak mengenai penambahan laporan keuangan ini

Responden : kita begini, laporan keuangan itu kan by sistem. Ndak ada orang yang bekerja, apa yang mau dikerja nah tinggal entry

Peneliti : jadi sistemnya ini dibuat sendiri pak atau ada bantuan luar?

Responden : tidak, harus terintegrasi. Sistem itu tidak boleh sendiri-sendiri dibuat di keuangan di atas untuk seluruh SKPD

Peneliti : jadi kita menunggu dari pemkot pak

Responden : iyah kita menunggu dari sana bagaimana pola sistemnya itu. Tidak boleh kita buat.

Peneliti : kalo yang di pemkot itu pak dibuat sendiri atautkah ada jasa konsultannya

Responden : ada konsultannya, mereka mendampingi itu dalam menyiapkan perangkatnya. IT sudah maju sedemikian rupa. Sudah tidak susah. Diprogramkan saja. baru kan ada IT di bidang akuntansi, sudah ada program jadi tidak susah. Tinggal kita rubah sedikit yang tadinya cash basic ke akrual full itu sudah selesai. Jadi mulai pada saat transaksinya sampai pada saat neracanya sudah ada semua. Begini, kita susun APBD nah itu semua sudah tersusun by sistem kemudian sudah ada jurnal otomatis kemudian sudah itu lari ke transaksi, transaksi ke bukti, bukti ke neraca saldo langsung ke neraca nah itulah laporan keuangan. Persoalannya sekarang teman-teman kan komputer ini alurnya ini mereka tidak paham yang jelas ujungnya sampai kepada catatan atas laporan keuangan. Apalagi laporan keuangan di SKPD kan ada satu tidak dibuat yaitu lapora arus kas. Jadi laporan arus kas dibuat hanya untuk entitas pelaporan bukan pada entitas akuntansi. Seperti kami disini SKPD sekretariat daerah yah entitas akuntansi bukan entitas pelaporan.

Peneliti : Kemudian bagaimana mengenai peraturan daerahnya pak

Responden : pasti harus dibuat, setelah itu peraturan walikota dengan peraturan daerah pengelolaan keuangan harus direvisi dulu. Kebijakan akuntansi juga harus direvisi dulu.

Peneliti : tapi belum ada pak sampai sekarang ?

Responden : iyah belum.

Peneliti : pembicaraan mengenai perubahan revisi ini pak?

Responden : sebenarnya bukan kami disini. Pertanyaan itu bukan untuk disini. Hal itu diatur di bagian keuangan pemerintah kota. Disini kan cuma menerima makanya kau harus bedakan yang mana entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi kan cuma pencatatan kalau regulasinya bukan kita yang buat. Kita Cuma menunggu regulasi.

Peneliti : jadi artinya pak disini kita hanya menerima adanya perubahan

Responden : iyah menerima perubahan.

Peneliti : jadi secara individu pak bagaimana tanggapannya mengenai PP 71 ini

Responden : perubahan dalam pemerintah harus dilaksanakan yah. Tidak boleh tidak. Masak tidak dilaksanakan padahal ini sudah ada PP. Setelah undang-undang itu PP urutan kedua, begitu tingginya PP diterjemahkan lagi ke permendagri dari situ diterjemahkan lagi ke peraturan daerah kemudian ke peraturan walikota.

Peneliti : jadi ketika ada payung hukumnya pak mau tidak mau pak harus dilaksanakan

Responden : harus. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang harus dilaksanakan apalagi nanti kalau ada sanksi. Misalnya daerah siapa yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi.

Peneliti : jadi kendalanya ini pak sampai belum mampu diterapkannya PP 71 kira-kira apa?

Responden : yang saya ragukan ini dari aspek legalitas aturannya yang tidak cepat dibuat. Kalo baru PP yah harus dibuat peraturan walikotanya. karena ada peraturan walikota sebelumnya kan bukan akrual tapi cash basic

Peneliti :jadi penyusunan regulasinya berjalan lambat yah pak?

Responden : harus dibuat itu tahun 2013 kan tahun 2014 sudah mulai diterapkan.

Peneliti : jadi kendala belum diterapkannya itu hingga sekarang diliat lagi dari regulasinya pak

Responden :iyah dan memang kan belum dilaksanakan sekarang.

Peneliti : begini pak, kan ada pak entitas yang bersedia untuk menerapkan lebih awal ini PP 71.

Responden : tidak boleh itu. Makanya saya bilang entitas akuntansi harus sama dan seragam. Kita tidak boleh bilang, misalnya kau gunakan A saya gunakan B itu tidak boleh. Kan itu bisa kacau laporan keuangannya.

Peneliti : jadi memang untuk pemda sudah dijadwalkan 2014 pak

Responden :2014 mulai berlaku jadi seluruh indonesia 2014 tidak boleh dibilang misalkan pendidikan sudah mau laksanakan tapi disini belum. Nah, tidak boleh begitu namanya SKPD harus serentak satu kota. Bisa saja kalo di tahun 2014 minta diundurkan kalo tidak siap. Itupun kalo satu kota yang minta. Tapi ada juga kota yang maju bisa saja ada daerah lain kayak semarang itu cepat sekali dia mungkin 2013 dia sudah uji coba seluruh SKPD bukan berarti dia pilih-pilih SKPD. Ada juga pilih-pilih dalam konteks uji coba.

Peneliti : kalau di makassar pak belum ada uji cobanya pak.

Responden :oh belum. Tapi kalau uji coba bisa, tapi tidak terpengaruh terhadap program yang sedang berjalan ini. Harus programnya tersendiri. Seperti Surabaya, semarang, yogya itu cepat sekali.

Peneliti : kalau dalam tahap uji coba pak sudah ada?

Responden : oh itu saya belum tahu, di makassar belum ada, belum ada yang mau uji coba.

Peneliti : jadi kalo dari sarana semuanya sudah oke pak.

Responden : Sebenarnya tidak ada masalah itu sarana. SDM nya juga.

Peneliti : semuanya sudah oke pak kecuali dari regulasinya

Responden :iyah regulasinya, karena beberapa SKPD itu memang sudah ada tenaga-tenaga akuntansinya. Sudah banyak tenaga akuntansinya di SKPD.

Peneliti :kalau disini pak semua backgroundnya akuntansi

Responden :tidak cuman satu. Kenapa mau terlalu banyak. Kemudian sekarang dek tidak terlalu repot karena semuanya by sistem.

Peneliti : tapi pak biasanya kalau semuanya by sistem, kita biasanya asal langsung memasukkan transaksi saja.

Responden : oh tidak, transaksinya juga kan transaksi otomatis bukan transaksi yang data sumbernya sembarangan, datanya juga harus akurat karena semuanya saling link. Baru semua serba cepat, satu kali saja kau entry misalnya entri belanja langsung jurnal selesai neraca saldo selesai posting selesai. Hitungan detik saja.

Peneliti :kemudian pak misalnya diterapkannya nanti ini PP 71 apakah dapat meningkatkan opininya kota Makassar

Responden : kalo itu yah kita berharap seperti itu.

Peneliti :sekarang pak masih WDP, jadi ketika beralih apakah dapat berubah WTP?

Responden :sekalipun tidak beralih kita harus menuju itu wajar tanpa pengecualian tapi tidak berarti bahwa sekalipun juga seperti sekarang yah kita juga harus capai WTP.

Peneliti :jadi memang pada tahun 2014 pak yah untuk penerapannya

Responden :iyah nanti 2014, kau baca baik-baik saja. sekarang ini untuk tahap persiapan saja terus.

Peneliti :Cuma saya mau tau pak tahap persiapan sekarang ini sampai mana?

Responden :kalau mau pelatihan sudah, perangkatnya kan sudah ada sekarang. Tinggal itu regulasinya saja perlu disiapkan.

Peneliti : setelah regulasi pak kemudian sistemnya diatur

Responden :iyah kemudian sistemnya. Sistemnya juga itu mudah sehari saja bisa apalagi kalau yang tangani dari akuntansi. Yang susah itu programernya bukan dari akuntansi. Kemudian ada manual book nya kan jadi tinggal baca SOP.

Peneliti :kemudian pak disini kalau dalam teori disini dikatakan kalau laporan keuangan yang berbasis akrual memberikan informasi yang lebih akurat dan andal. Bagaimana tanggapannya pak?

Responden :iyah memang. Teorinya kan begitu. Kenapa? Saya tanya dulu kenapa?

Peneliti :karena lebih menggambarkan pak proses kinerjanya karena adanya laporan operasionalnya dimana diperoleh nilai ini.

Responden :contoh begini yah jangan terlalu lebar misalkan transaksi retribusi sampah. Bagaimana? Satu transaksi saja kau contohkan itu bahwa dari segi mananya akurat?

Peneliti :misalkan belanja kendaraan pak aset. Jadi sekarang pak kalo kas menuju akrual itu masih mengakui sebagai belanja modal pada kas sedangkan nanti dia korolari sebagai aset yang diinvestasikan pada mobil.

Responden :sekarang itu sudah berlaku, jangan lagi kau cerita yang sudah berlaku, maunya kau cerita yang belum berlaku. Kalau yang berkaitan dengan neraca itu sudah akrual. Bahwa seluruh transaksi neraca sudah akrual itu. Dikatakan kas menuju akrual jadi masih ada yang cash nah sekarang yang cash itu menjadi akrual.

Peneliti :pak yang itu tadi masih diakui sebagai belanja modal jadi dia mempengaruhi laporan realisasi...

Responden :tapi, pada akhirnya dia masuk ke neraca.

Peneliti :iyah pak.

Responden :oh tidak begitu. Jadi kita mencatatnya itu kas di bendahara. jadi tidak langsung modal. Mobil dulu baru ke modal. Modal kemudian dikorolari lagi aset tetap berubah ke apa tadi peralatan dan mesin. Kan mobil itu masuk ke peralatan dan mesin . jadi sebenarnya sudah neraca itu jangan miy itu. Itu sudah jalan lama miy 6 tahun kah atau 7 tahun.

Peneliti :owhh iyah pak

Responden :nah yang saya maksud ini transaksi penerimaan jadi misalnya begini di APBD kan ada anggaran, ada nanti realisasi, ada lebih kurang. Jadi misalnya anggarannya 10 nah ini perda ditetapkan kemudian kalau akrual sudah berjalan ini kita sudah akui tapi sekarang kan belum. Nah ini maksud saya ini.

Peneliti : owh iyah pak.

Responden :kalau yang tadi itu sudah pasti jangan dicerita lagi. Makanya saya bertanya berkaitan langsung dengan neraca sudah otomatis. Ini belum diakui. Nah sekarang kalau realisasi Cuma 9 nah kan kurang satu jadi satunya ini kemana?. Apa dia diakui sebagai piutang. Sekarang kan tidak ada utang piutang kan. Kita kan tidak pernah garuk-garuk ini dimana ini satunya.

Peneliti :jadi disitu miy pak tergambarkannya ini satu dari mana

Responden :nah begitu maksud saya jadi kalau di akrual nanti tergambarkan pendapatan dan belanja. Kalau tadi belanja yang berkaitan dengan neraca maka itu otomatis masuk di neraca. Jadi kau pelajari ini. Ini untuk pendapatan yah bagaimana kalau belanja dan bagaimana kalau pendapatannya menjadi 11 jadi dia lebih. Kemudian ini pendapatan pada saat mana dia diakui sebagai piutang. Sebelum kita kerja kan 10 kan sudah ada piutang. Padahal belum orang kerja tapi sudah ada. Apakah pada saat penetapan APBD ataukah pada saat skpd ada yaitu surat ketetapan pajak daerah.kalo sekarang itu model cash basic pada saat

surat ketetapan pajak daerahnya ditetapkan nah disitu diakui. Sekalipun itu bukan kas. Nah jadi pada saat mana anggaran ditetapkan atautkah skpd ditetapkan

Peneliti :pada saat anggaran ditetapkan kan pak

Responden :bukan pada saat skpd ditetapkan yah? Jadi kalau misalnya skpdnya Cuma 9 yang dikeluarkan

Peneliti :jadi pada saat yang diaanggarkan

Responden : nah itu kau pelajari matang itu yang mana itu karena turunannya itu anggaran ada lagi yaitu surat ketetapan pajak. Skpd kan baru disampaikan kepada yang bersangkutan kepada pengusaha misalnya ini yang kau harus setor. Jadi kalau transaksi yang berkaitan dengan neraca jangan mko karena itu sudah. makanya disebut cash basic karena berkaitan saja dengan pendapatan dan belanja.

Peneliti :kan pak di sini juga ada laporan pelaksanaan anggaran

Responden :nah ini mi laporan pelaksanaan anggaran yang berkaitan langsung dengan APBD. Pada saat APBD itu ditetapkan maka sudah muncul. Itu jiy yang membedakan. Ada nanti pendapatan yang melampaui target dan tidak.

Peneliti : kalau begitu terima kasih banyak ini pak. Maaf sudah mengganggu.

Responden : oh iyah tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan kau bisa kembali lagi ke sini.

MANUSKRIP

Responden : Fausyiah Anwar

Waktu wawancara : 21 Desember 2012 (11.10-11.35)

Peneliti : pertama disini yang ingin saya ketahui kak, basis akuntansi yang digunakan saat ini dalam penyusunan laporan keuangan apa?

Responden : sampai sekarang ini masih cash menuju akrual.

Peneliti : jadi PP 24. Kemudian apakah pegawainya disini sudah tahu tentang adanya peralihan nanti menuju ke PP 71.

Responden : seperti yang adek ketahui hanya sebagian

Peneliti : jadi hanya dari kalangan akuntansi saja

Responden : iyah jadi dari kalangan yang kerja di keuangan pasti dia tahu. Bagaimana dasarnya untuk kerja laporan.

Peneliti : jadi yang kerja laporan keuangan saja kak yang tahu tentang PP 71 ini

Responden : iyah

Peneliti : kemudian bagaimana disini pemahamannya kakak terkait dengan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan

Responden : kalau pemahaman saya tentang basis akrual itu suatu standar, standar pemerintahan yang dimana mengakui kejadian ekonomi itu pada saat terjadinya kejadian tersebut. Bukan pada saat menerima kas.

Peneliti : jadi contoh transaksinya disini seperti apa kak?

Responden : kalau disini mungkin, saya contohkan saja umpamanya surat ketetapan pajak daerah itu diakui pada saat kejadian itu bukan pada saat menerima uang

Peneliti : jadi pada saat surat ketetapan pajak terbit

Responden : iyah jadi pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan maka itu diakui.

Peneliti : kemudian bagaimana tanggapannya dengan laporan keuangan yang dihasilkan dengan konsep akrual

Responden : mungkin tanggapan saya bagus yah karena dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.

Peneliti : maksudnya meningkatkan kualitas?

Responden : meningkatkan kualitas dari laporan keuangan sendiri itu karena lebih banyak item-item yang di kandung dalam PP 71 tahun 2010 dan lebih menerangkan

Peneliti : oh jadi ada yang tidak ada pada PP 24 ada di PP 71?

Responden : iyah

Peneliti : kemudian kalau mengenai perdanya itu bagaimana?

Responden : kalau perda itu saya kurang tahu karena itu pemkot sendiri masih dalam tahap kas menuju akrual belum akrual full.

Peneliti : kalau misalnya kita memakai basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan basis akuntansi yang lain. Bagaimana tanggapannya kak

Responden : memang seperti itu karena dari laporan keuangan sendiri sudah terdiri dari beberapa item sedangkan basis kas menuju akrual hanya beberapa item yang ada.

Peneliti : beberapa item itu kayak apa yah?

Responden : umpamanya kalau di akrual itu ada laporan operasional sedangkan di kas itu tidak ada.

Peneliti : sekarang ini belum ada peraturan-peraturannya. Kira-kira kendalanya apa kak?

Responden : mungkin untuk sementara masih sosialisasi dulu yah karena banyak yang tidak kenal dengan basis akrual apalagi pemkot sendiri bukan hanya akuntansi yang di sana.

Peneliti : kalau kita sudah pernah sosialisasi kak?

Responden : saya sendiri sudah berapa kali. Kemarin juga ikut sosialisasi dari pemkot.

Peneliti : kira-kira sudah berapa kali kak

Responden : mungkin sekitar 2 sampai 3 kali

Peneliti : kemudian hanya kita yang diikutsertakan

Responden :iyah cuman saya yang ikut sosialisasi dek.
Peneliti :Kalau menurut kita prediksi kedepannya ini kenapa belum mampu untuk diterapkannya ini PP 71?

Responden :terhambatnya sendiri mungkin dari sumber daya manusia sendiri. Karena namanya juga baru jadi mungkin agak sulit untuk mengadaptasinya dari PP 24 ke PP 71. Kedua mungkin karena waktu masih kas aturan PP 24 itu masih banyak laporan keuangan yang disclaimer dari BPK apalagi kalau mungkin mau ke akrual. Jadi mungkin agak sulit yah.

Peneliti :jadi kalau dari sarana dan prasarana nya sudah bagus kak?
Responden : kalau prasarana saya kurang tau karena masih sementara ini sosialisasi.

Peneliti :tapi kalau untuk yang PP 24 bagaimana mulai dari sistem akuntansinya apakah sudah bagus

Responden :iyah
Peneliti :kalau literturnya apakah sudah ada disediakan mengenai PP 71?
Responden :sekarang ini masih baca yah karena masih dalam tahap sosialisasi
Peneliti :kemudian jadi perlu lagi diadakan lagi ini nanti pengadaan untuk sarana prasarananya

Responden :kalau ke PP 71 mungkin masih ada peningkatan sarana prasarana kan pasti berbeda dari sistem sendiri juga pasti berbeda dari basis kas menuju akrualnya.

Peneliti :jadi kalau dari komputernya kemudian jaringan yang ada apakah sudah okey?

Responden : iyah.
Peneliti :apakah dengan diterapkannya ini PP 71 kira-kira bisa meningkatkan opini dari WDP menuju WTP?

Responden :kemungkinan bisA, karena kita lihat sendiri dari laporannya lebih bagus. Lebih terperinci yah.

Peneliti :apakah sudah ada disini dukungan dari pejabat yang berwenang? apakah komitmennya sudah sepenuhnya?

Responden : iyah sudah.
Peneliti :jadi kendalanya disini dilihat dari hanya SDM nya saja
Responden :iyah dari SDM sama prasarana berupa sistemnya yah.
Peneliti : jadi yang lainnya sudah okey kak?
Responden : iyah memang mungkin ada penambahan lagi kalau mau berganti karena beda kan dari kas ke akrual.

Peneliti :kemudian bagaimana dengan budaya organisasinya setelah adanya PP 71 ini

Responden : perubahan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru artinya sudah seharusnya kita laksanakan karena ini sudah dalam bentuk peraturan pemerintahnya dek.

Peneliti :kemudian responnya secara pribadi bagaimana dengan keputusannya disini dengan peralihan ke PP 71

Responden : kalau saya sendiri kalau PP 71 itu menurut saya bagus karena itulah meningkatkan kualitas laporan keuangannya sendiri jadi akuntan publik sendiri bisa masuk ke dalam untuk menilai biaya-biayanya kan biaya-biaya bisa diperinci, lebih kentara karena dengan adanya laporan LO

Peneliti :kalau misalkan nanti sistem akuntansinya dibuat apakah dari pemerintah kota atau SKPDnya lain tersendiri?

Responden :kalau sistem itu dibuat langsung dari keuangan yang ada di pemerintah kota. Nanti disampaikan kepada SKPD-SKPD yang ada.

Peneliti : jadi tunggu dari arahan pemkot yah kak?
Responden :iyah, karena keuangan yang bikin.
Peneliti :jadi di pemkotnya ini ada jasa konsultasinya kak?
Responden : mungkin disana itu ada semacam programnya.

Peneliti : kemudian dari sosialisasi yang diikuti ini bagaimana tanggapannya kak? Apakah memang sudah mengerti akan basis akrual?

Responden : mungkin mengerti full tidak tapi namanya juga baru yah setengah-setengah. Disana waktu saya ikut sosialisasi ada transaksi yang dikerjakan.

Peneliti : tapi kalau untuk PP 24 nya sendiri sudah menunjang untuk penyusunan laporan keuangannya?

Responden : iyah sudah.

Peneliti : oh iyah terima kasih kak atas informasinya.

Responden : iyah sama-sama.

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Andi Faradillah
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 21 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : jln. A. P. Pettarani Komp BPK Blok B Nomor 8
Telpon Rumah dan HP : 085256369496
Alamat Email : a.faradillah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
TK Al-Hidayah Hartaco Indah 1994-1996
SDN Sudirman I Makassar 1996-2002
SMP Negeri 8 Makassar 2002-2005
SMA Negeri 1 Manado 2005-2008
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Makassar
- Pendidikan Nonformal
Yayasan Pendidikan 'Adhiputeri'

Riwayat Prestasi

- Prestasi Akademik
(tidak ada)
- Prestasi Nonakademik
(tidak ada)

Pengalaman

- Organisasi
(tidak ada)
- Kerja
(tidak ada)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, April 2013

Andi Faradillah